RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

INSPEKTORAT 2018-2023

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PONTIANAK

2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. MARLYNA, M.Si, CRA., CRP., CGCAE

NIP : 19670115 198603 2 008

Jabatan : Inspektur

Instansi : Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Dengan ini menyatakan bahwa, Renstra Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2018-2023 ini telah disesuaikan dengan hasil verifikasi bersama Tim Verifikator dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

INSPEKTUR PROVINSI,

Dra. MARLYNA, M.Si, CRA., CRP, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP 19670115 198603 2 008

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
PERUMUSAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023

No.	DOKUMEN JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN					
		MATERI		SUBSTANSI		FAKTOR PENYEBAB TIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT PENYEMPURNAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah	√		√			
2	Penyiapan Data dan Informasi	√		√			
3	Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	√		√			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	√		√			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	√		√			
6	Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah Provinsi	√		√			
7	Perumusan Isu-Isu Strategis	√		√			
8	Perumusan Tujuan Pelauanan Jangka Menengah Perangkat Daerah Provinsi	√		√			
9	Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah Provinsi	√		√			
10	Mempelajari Surat Edaran Gubernur Perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD Provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah Provinsi	√		√			
11	Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah Provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi	√		√			
12	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√		√			
13	Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi	√		√			
14	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Provinsi	√		√			
15	Perumusan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	√		√			
16	Rumusan rancangan akhir renstra inspektorat provinsi	√		√			
17	Pentahapan pelaksanaaan Program Inspektorat Provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi	√		√			
18	Dokumen Renstra Inspektorat Provinsi yang telah disahkan	√		√			

INSPEKTUR PROVINSI,

Dra. MARLYNA, M.Si, CRA., CRP, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP 19670115 198603 2 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan. Dokumen Renstra ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai pelaksanaan atas amanat Undang-Undang tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. RPJP Provinsi Kalimantan Barat tersebut selanjutnya dijabarkan dalam RPJMD (5 tahunan). Renstra ini dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap target rencana kerja di lingkungan Inspektorat sebagaimana RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 sebagaiman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan arah yang jelas bagi pimpinan, staf dan stakeholder Inspektorat guna menentukan hasil akhir yang ingin dicapai pada masa akhir RPJMD Perubahan di 2023, selain itu Dokumen Renstra juga merupakan pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dansasaran serta langkah-langkah strategis.

Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat diharapkan Inspektorat dapat memaksimalkan dan mensinergikan seluruh kekuatan dan peluang yang dimiliki serta dapat meminimalkan kelemahan dan kendala yang dihadapi, sehingga dapat mendorong terselenggaranya *good governance* (pemerintahan yang baik) dan peningkatan pelayanan publik.

Keberadaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan kinerja Inspektorat mutlak diperlukan, sehingga Inspektorat diharapkan dapat tumbuh sebagai lembaga pengawasan yang kuat dan profesional dalam mencegah timbulnya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan pengelolaan keuangan.

Demikian Rencana Strategis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi semua komponen yang berada di Inspektorat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Tulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH **8**
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat 8
2.2. Sumber Daya Inspektorat 15
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat 18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat 27

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS **34**
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat..... 34
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur 39
3.3. Telaah Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 41
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 43
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis..... 44

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **47**
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat 47

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **79**

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **83**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **115**

BAB VIII PENUTUP **117**

DAFTAR ISI

Halaman

Tabel 2.1. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin..... 20
Tabel 2.2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan 20
Tabel 2.3. Daftar Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Kondisi Baik)..... 21
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Prov. Kalbar Tahun 2014-2018..... 26
Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat 24
Tabel 4.1. Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat 49
Tabel 4.2. Indikator Kinerja dan Rumus 78
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 80
Tabel 6.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Inspektorat 85
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023..... 115

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Keterkaitan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah 3
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat... 18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I *Cascading* Inspektorat 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran utama dalam tugas pengawasan intern di lingkungan pemerintahan. Pengawasan intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik.

Kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (*quality assurance*). Kegiatan pengawasan lain lebih ditekankan kepada kegiatan *consulting*, seperti: sosialisasi, pembimbingan, konsultansi, dan kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan peran Inspektorat sebagai partner atau *problem solving* dalam setiap kegiatan pemerintahan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.

Peran Inspektorat melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* diharapkan dapat memberikan nilai tambah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas operasional dalam mencapai tujuan organisasi, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, bahwa perwujudan peran pengawasan intern yang efektif sekurang-kurangnya harus: (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; (b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Hal tersebut selaras dengan yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa pembinaan yang dilakukan merupakan segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pengawasan yang

dilakukan merupakan segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Inspektorat memiliki peran yang strategis, tidak hanya dalam menemukan penyimpangan, akan tetapi lebih pada upaya pencegahan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan, serta untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, bahwa Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat merupakan perangkat daerah pembantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi: (a) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan di wilayah Provinsi; (b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di wilayah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur; (d) penyusunan laporan hasil pengawasan; (e) pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi; dan (f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perumusan kebijakan teknis pengawasan serta untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat menyusun dokumen perubahan perencanaan strategis lima tahunan periode 2018-2023, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai sinkronisasi, sinergisitas dan penyelarasan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana yang ditetapkandi dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

Memperhatikan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebelum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Kalimantan Barat, disusun dengan tahapan: (a) persiapan penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan; (d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (e) perumusan rancangan akhir; dan (f) penetapan. Dalam tahapannya, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan, pendanaan, target dan indikator kinerjanya telah selaras dengan visi dan misi daerah sebagaimana yang ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Keterkaitan Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018- 2023 dengan RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Keterkaitan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

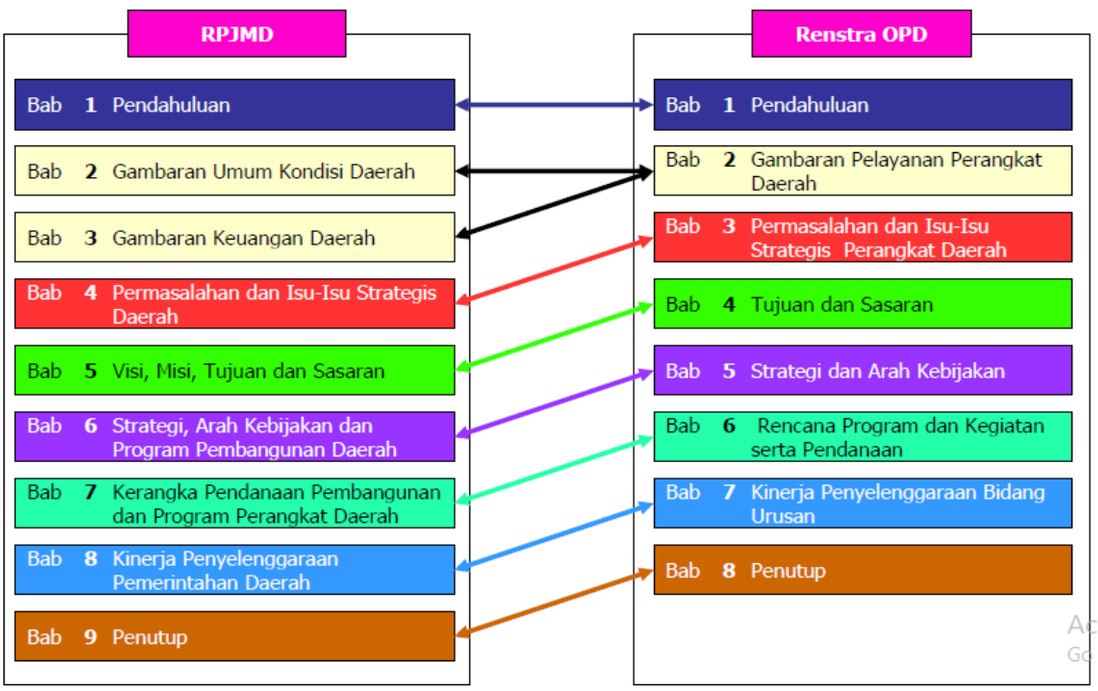

Sumber: Hasil Analisa Permendagri No. 86 Tahun 2017 (2022)

1.1. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dan mengatur struktur organisasi dan tata kerja, tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 148 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 ditetapkan untuk menyesuaikan target dan memberikan arahan acuan didalam mewujudkan tujuan sesuai dengan visi dan misi daerah, sehingga seluruh upaya yang dilakukan bersifat sinergis dan saling melengkapi satu sama lainnya.

1.2.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Kalimantan BaratTahun 2018-2023, adalah:

1. Merumuskan penyesuaian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat untuk kurun waktu 2018-2023;
2. Menetapkan program dan kegiatan prioritas serta target dan indikator kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat untuk kurun waktu 2018-2023;
3. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan untuk kurun waktu 2018-2023;
4. Acuan dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan untuk kurun

waktu 2018-2023;

5. Alat ukur dalam evaluasi kinerja tahunan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

1.2.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, adalah:

1. Mempermudah dalam merumuskan perencanaan agar lebih terarah dan terukur;
2. Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
3. Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah sebagaimana yang ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sesuai dengan bidang urusan yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat;
4. Acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang lebih terarah dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

1.3. Sistematika Penulisan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang: latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menguraikan tentang: tugas, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat; sumber daya yang dimiliki Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat; kinerja pelayanan yang menggambarkan capaian Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat periode sebelumnya serta anggaran dan realisasinya; tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan (program) Inspektorat

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menguraikan tentang: identifikasi permasalahan yang dihadapi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan daerah; telaahan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat terpilih; telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menguraikan tentang: tujuan dan sasaran tahun 2018-2023 Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menguraikan tentang: pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2018-2023.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan tentang: rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menguraikan tentang: indikator kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai, mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang: kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peran Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sebagai APIP dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sedangkan peran Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sebagai APIP dalam pelaksanaan pengendalian intern pemerintah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dijelaskan di dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugasnya membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan di wilayah Provinsi;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di wilayah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

a. Inspektur;
b. Sekretariat;
c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
f. Inspektur Pembantu Khusus;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun masing-masing tugas dari struktur Inspektorat sebagai berikut :

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan,mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektur mempunyai fungsi:

a. penetapan program kerja di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
b. perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
d. pengendalian kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan inspektorat;
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan kebijakan di bidang pengawasan;
h. penyelenggaraan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan berdasarkan program kerja yang ditetapkan;
i. pelaksanaan tugas pembantuan dan fungsi lainnya di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Gubernur.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, administrasi kepegawaian dan umum, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi pemerintahan di bidang pengawasan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
e. penyusunan rencana kerja di lingkungan Sekretariat;
f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi dan umum;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik;
i. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
j. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
k. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Inspektorat Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
l. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan;
m. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, administrasi kepegawaian, tata usaha umum, organisasi dan tatalaksana di lingkungan Inspektorat Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan;
n. pelaksanaan tugas di bidang mengumpul, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional, melakukan administrasi pengaduan masyarakat dan menyusun laporan kegiatan pengawasan;

o. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan administrasi laporan, evaluasi laporan dan penyusunan statistic hasil pengawasan serta penyelenggaraan kerjasama pengawasan;

p. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;

q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat Provinsi;

r. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Inspektur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat membawahi: (a) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dan (b) Sub Bagian Administrasi dan Umum.

2.1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset (PKA) dipimpin oleh seorang **Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan dan Aset** yang mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, rencana strategis, pengelolaan keuangan dan asset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Sub;bag Perencanaan, Keuangan dan Aset

b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset;

c. Pelaksanaan kompilasi dan penyelearasan program dan rencana kerja di lingkungan Inspektorat Provinsi;

d. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;

e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset;

f. Penyusunan anggaran pada Inspektorat Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan;

g. Penyiapan laporan dan statistik Inspektorat Provinsi, peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan;

h. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;

i. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset sesuai peraturan perundang-undangan;
j. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang PKA;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang PKA;
l. Pelaksaan fungsi lain di bidang PKA yang diserahkan oleh Sekretaris.

2.2. Subbagian Administrasi Umum

Subbagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh seorang **Kasubbag Adminstrasi dan Umum** yang mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan administrasi dan umum, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian adminitrasi dan umum mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Subbagian administrasi dan umum;
b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang administrasi dan umum;
c. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian administrasi dan umum;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang adminitrasi dan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
e. Pengelolaan adminitrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis laporan;
f. Pengelolaan urusan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Provinsi;
g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang administrasi dan umum;
h. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
i. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang administrasi dan umum;
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi dan umum;
k. Pelaksanaan fungsi lain di bidang administrasi dan umum yang diserahkan oleh Sekretaris.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, bertugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan serta melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah I, dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada wilayah I, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan di wilayah I.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan pengawasan wilayah I;
b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah I;
c. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah I;
d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah I;
e. pelaksanaan pendampingan (probity advice) atau pemeriksaan (probity audit) pada wilayah I;
f. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah NonKementerian, Inspektorat Provinsi;
g. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada wilayah I;
h. pembinaan yang dilakukan dalam bentuk : fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah I;
i. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan pada wilayah I;
j. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah I;
k. pengkoordinasian program pengawasan pada wilayah I;
l. pengkoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas pada wilayah I;
m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah I; dan

n. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah I yang diserahkan oleh Inspektur.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, bertugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan serta melaksanakanpengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah II, dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada wilayah II, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan di wilayah II.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan pengawasan wilayah II;
b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah II;
c. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah II;
d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah II;
e. pelaksanaan pendampingan (probity advice) atau pemeriksaan (probity audit) pada wilayah II;
f. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah NonKementerian, Inspektorat Provinsi;
g. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada wilayah II;
h. pembinaan yang dilakukan dalam bentuk : fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah II;
i. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan pada wilayah II;
j. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah II;
k. pengkoordinasian program pengawasan pada wilayah II;
l. pengkoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas pada wilayah II;
m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah II; dan

n. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah II yang diserahkan oleh Inspektur.

5. Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, bertugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan serta melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah III, dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada wilayah III, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan di wilayah III.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan pengawasan wilayah III;
b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah III;
c. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah III;
d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah III;
e. pelaksanaan pendampingan (probity advice) atau pemeriksaan (probity audit) pada wilayah III;
f. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah NonKementerian, Inspektorat Provinsi;
g. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada wilayah III;
h. pembinaan yang dilakukan dalam bentuk : fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah III;
i. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan pada wilayah III;
j. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah III;
k. pengkoordinasian program pengawasan pada wilayah III;
l. pengkoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas pada wilayah III;
m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah III; dan
n. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah III yang diserahkan oleh Inspektur.

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, bertugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan serta melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah IV, dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada wilayah IV, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan di wilayah IV.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan pengawasan wilayah IV;
b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah IV;
c. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah IV;
d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah IV;
e. pelaksanaan pendampingan (probity advice) atau pemeriksaan (probity audit) pada wilayah IV;
f. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah NonKementerian, Inspektorat Provinsi;
g. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada wilayah IV;
h. pembinaan yang dilakukan dalam bentuk : fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah IV;
i. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan pada wilayah IV;
j. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah IV;
k. pengkoordinasian program pengawasan pada wilayah IV;
l. pengkoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas pada wilayah IV;
m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah IV; dan
n. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah IV yang diserahkan oleh Inspektur.

7. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, bertugas melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan pengawasan khusus dan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
b. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat:
c. pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Dengan Tujuan Tertentu (PDTT);
d. pelaksanaan reviu atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemerintah provinsi;
e. pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota;
f. pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten/kota;
g. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan khusus yang diserahkan oleh Inspektur.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari jabatan fungsional Auditor, PU2PD dan jabatan fungsional lainnya.
2) Jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi berada di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Inspektur Pembantu.
3) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

4) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD dan jabatan fungsional lainnya, yaitu jabatan fungsional yang mempunyai tugas melakukan pengawasan pada instansi pemerintah yang dalam pelaksanaan tugaasnya berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
5) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsioanal ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan struktur organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, disajikan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

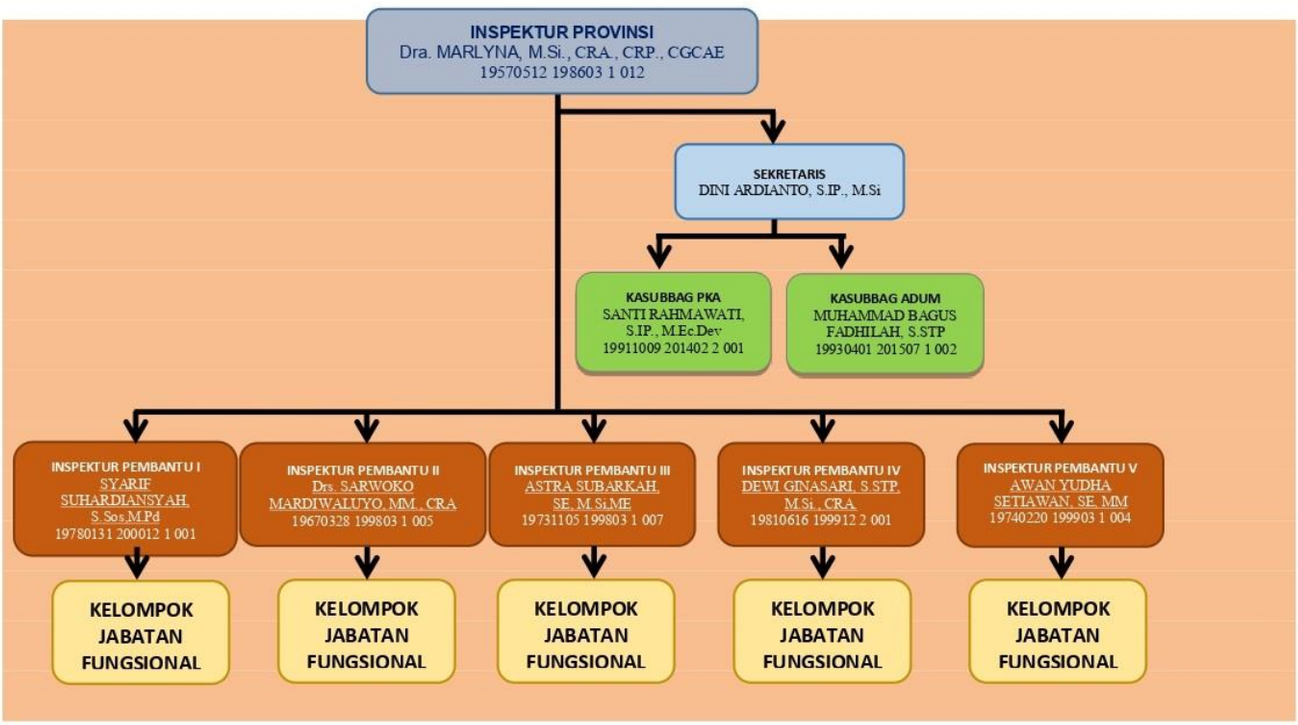

Sumber: Pergub Kalbar No. 148 Tahun 2021

2.2. Sumber Daya Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Sumber daya merupakan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi organisasi yang dapat dikelola dan diberdayakan sesuai dengan tujuan organisasi. Sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat digambarkan menjadi dua kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya aset.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah sumber daya yang ada pada manusia itu sendiri, yang dapat ditinjau dari jumlah (kuantitas) maupun dari kemampuan,

keahlian, keterampilan, atau kompetensi (kualitas) yang dimiliki. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat per-8 Februari 2022 sebanyak 117 orang. Gambaran kondisi ASN-nya, dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan Pendidikan		Berdasarkan Golongan		Berdasarkan Jabatan	
Uraian	**Jumlah (orang)**	**Uraian**	**Jumlah (orang)**	**Uraian**	**Jumlah (orang)**
Pasca Sarjana	35	Pembina Utama Madya (IV/d)	2	Struktural	9
Sarjana	51	Pembina Utama Muda (IV/c)	10	Fungsional	
Diploma 4	8	Pembina Tingkat I IV/b	12	Auditor	38
Diploma 3	14	Pembina IV/a	7	Audiwan	2
SLTA	6	Penata Tingkat I III/d	17	P2UPD	33
SMA	2	Penata III/c	13	Analis Kebijakan Ahli Muda	1
SMEA	1	Penata Muda Tingkat I III/b	21	Arsiparis Mahir	1
SMP	0	Penata Muda III/a	21	Arsiparis Ahli Pertama	1
SD	0	Pengatur Tingkat I II/d	6		
		Pengatur II/c	8	Pelaksana	32
Jumlah	**117**	**Jumlah**	**117**	**Jumlah**	**117**

Sumber : Inspektorat Prov. Kalbar (2021`)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemeriksaan, personil yang dilibatkan adalah PNS yang telah memiliki sertifikasi pengawas baik sebagai Auditor maupun P2UPD.

Jumlah ASN Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat terbanyak adalah Golongan III sebanyak 72 orang atau 61.53%, kemudian ASN Golongan IV sebanyak 31 orang atau 26,49%, terakhir ASN Golongan II sebanyak 14 orang atau 11,96%, dan tidak ada ASN Golongan I. Kemudian, jumlah ASN Jabatan Eseolon II, III, dan IV sebanyak 9 orang atau 7,69%.Hal ini juga menunjukkan bahwa seluruh formasi jabatan eselon pada InspektoratProvinsi Kalimantan Barat terisi/terpenuhi. Selanjutnya, Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 76 orang atau 64,95%, terdiri dari: JFA sebanyak 38 orang atau 32,47%, JFP2UPD sebanyak 33 orang atau 28,20%, JFA Kepegawaian sebanyak 2 orang atau

1,71%, dan Fungsional Arsiparis sebanyak 2 orang atau 1,71%.

Sementara itu, Jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikannya terbanyak adalah lulusan S1/D4 sebanyak 59 orang atau 50,42%, kemudian lulusan S2 sebanyak 35 orangatau 29,91%. ASN lulusan SLTA/Sederajat sebanyak 9 orang atau 7,69%, lulusan D3 sebanyak 10 orang atau 11,96%, serta tidak ada lulusan SLTP/Sederajat dan lulusanSD/Sederajat.

Tabel 2.1
Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jlh. Orang	%
1	Laki-laki	59	50,43
2	Perempuan	58	49,57
Total		**109**	**100,00**

Sumber: Inspektorat Prov. Kalbar (2021)

Jumlah ASN laki-laki dan perempuan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat hampir sebanding. ASN laki-laki sebanyak 59 orang atau 50,43%, dan perempuan sebanyak 58 orang atau 49,57%.

2.2.2. Sumber Daya Aset

Sumber Daya Aset adalah sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Gambaran kondisi sarana dan prasarana penunjang operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat per-31 Desember 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Kondisi Baik)

No	JENIS BARANG	JUMLAH	RASIO TERHADAP ASN
1	2	3	4
1	Mobil	7	0,059
2	Mesin Fotokopi	2	0,017
3	Lemari File + Rak Besi	122	1,04
4	Alat Penghancur Kerta	18	0,153
5	White Board + Electric White Board	7	0,059
6	Meja Rapat	50	0,427
7	Kursi Tamu	2	0,017
8	Kursi Tunggu	11	0,094
9	Sofa	16	0,136
10	Lemari Es	8	0,068
11	AC Split	39	0,333
12	Laptop	42	0,358
13	Monitor	19	0,162
14	Printer	59	0,504
15	Scanner	18	0,153
16	Meja Kerja	45	0,384
17	Kursi Kerja + Rapat	254	2,17
18	Proyektor	1	0,008
19	Professional Sound System	1	0,008
20	Telephone (PABX)	24	0,205

*Kolom 4 (rasio terhadap jumlah ASN) diperoleh dengan perbandingan antara kolom 3 (jumlah unit barang) dengan jumlah ASN pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 117 orang, dengan perbandingan bahwa setiap 1 unit barang (kolom 3) mendapat beban pemakaian sejumlah pegawai yang tercantum di kolom 4.

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat memiliki **Tujuan Strategis**, yaitu **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah**. Sementara itu, **Sasaran Strategis** dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, antara lain:

1. **Meningkatnya Nilai SAKIP Pengukuran Kinerja.** Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut adalah Nilai SAKIP Unsur Pengukuran Kinerja.
2. **Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal.** Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut adalah Nilai SAKIP Unsur Evaluasi Internal.
3. **Meningkatnya penilaian Reformasi Birokrasi yaitu area penguatan pengawasan internal.** Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut, antara lain:
   - Level Maturitas SPIP;
   - Level Kapabilitas APIP; dan
   - Nilai Persepsi Korupsi.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Prov. Kalbar Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Capaian Kinerja					Rasio Capaian Kinerja				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah fungsional Auditor dan P2UPD yang bersertifikasi	Orang	45	50	55	60	65	41	43	60	48	50	91,11	86,00	109,09	80,00	76,92
2	Jumlah fungsional Auditor dan P2UPD yang telah menyampaikan DUPAK	Orang	45	50	55	60	65	12	33	34	38	54	26,67	66,00	61,82	63,33	83,08
3	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	Orang	30	35	40	45	50	14	20	22	31	30	46,67	57,14	55,00	68,89	60,00
4	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi, bimtek, workshop, dll	Orang	30	35	40	45	50	31	50	36	90	58	103,33	142,86	90,00	200,00	116,00
5	Jumlah PNS yang mengikuti studi banding	Orang	30	35	35	40	40	36	30	30	38	20	120,00	85,71	85,71	95,00	50,00
6	Jumlah obyek periksa	Obrik	237	237	237	237	237	203	134	186	212	237	85,65	56,54	78,48	89,45	100,00
7	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	LHP	118	118	118	118	118	107	134	168	114	118	90,68	113,56	142,37	96,61	100,00
8	Pelaksanaan Rakorwasda , Penyusunan PKPT Provinsi dan Itjen	Keg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti	%	65	70	75	80	85	92	18	76	95	100	141,54	25,71	101,33	118,75	117,65
10	Jumlah Laporan Hasil Reviu (LKPD)	LHR	5	5	1	1	1	5	1	1	1	1	100,00	20,00	100,00	100,00	100,00
11	Jumlah SKPD yang di Evaluasi LAKIP	LHE	12	12	12	12	12	17	15	9	9	12	141,67	125,00	75,00	75,00	100,00
12	Jumlah Pegawai wajib dan menyampaikan LP2P	SKPD	3215	3215	3215	3215	3215	3215	3900	3900	3758	-	100,00	121,31	121,31	116,89	-
13	Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA	LHR	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	100,00	100,00	100,00
14	Jumlah EKPPD	LHE	-	14	14	14	14	-	14	14	14	14	-	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan PAMJAB	LHP	-	-	1	1	2	-	-	1	1	2	-	-	100,00	100,00	77,78
16	Persentase inventarisasi temuan	%	90	90	95	95	100	100	100	100	100	100	111,11	111,11	105,26	105,26	100,00
17	Persentase Temuan yang telah selesai ditindak lanjuti (temuan Inspektorat)	%	70	75	80	90	95	73,65	81,99	79,62	85,03	74,60	105,21	109,32	99,53	94,48	78,53
18	Persentase temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	%	-	75	80	90	95	-	71,64	68,57	80,68	88,28	-	95,52	85,71	89,64	92,93
19	Intensitas pelaksanaan larwasda	Keg	4	4	3	3	4	4	3	-	2	2	100,00	75,00	-	50,00	50,00
20	Persentase Penyelesaian TLHP Inspektorat Jenderal Kemendagri	%	70	75	85	80	95	81,17	98,73	100	100	107	115,96	131,64	117,65	125,00	112,63
21	Jumlah SKPD yang melaksanakan PMP-RB Provinsi dan Kab/ Kota	SKPD	55	55	8	9	9	8	7	8	9	9	14,55	12,73	100,00	100,00	100,00
22	Laporan Pelaksanaan Perpres No.55 Tahun 2012	Lap	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Persentase jumlah pejabat yang menyampaikan LHKASN	%	-	-	90	95	80	-	-	99,95	64,03	89	-	-	111,06	67,40	111,25

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Capaian Kinerja					Rasio Capaian Kinerja				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
24	Jumlah SKPD Fasilitasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	SKPD	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	-	-	100,00	100,00	100,00
25	Laporan Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi	Lap	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	-	-	100,00	100,00	100,00

Interpretasi capaian indikator kinerja

1. Rata-rata capaian pada IKU jumlah Fungsional Auditor dan P2UPD yang bersertifikasi dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sebesar 88,63%. Pencapaian realisasi yang belum mencapai target dikarenakan masih ada PNS yang telah memiliki sertifikat auditor dan P2UPD namun belum diangkat dalam jabatan fungsional. Capaian terakhir pada Tahun 2018 adalah 50 orang fungsional Auditor dan P2UPD jika dibandingkan dengan target, maka Inspektorat masih kekurangan 15 orang fungsional yang bersertifikat.
2. Rata-rata capaian pada IKU Jumlah Fungsional Auditor dan P2UPD yang menyampaikan DUPAK dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sebesar 60,18%. Masih rendahnya rata-rata pencapaian ini dikarenakan tingginya rasio beban kerja fungsional Auditor dan P2UPD sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian DUPAK. Capaian terakhir penyampaian DUPAK pada Tahun 2018 adalah 54 orang, serta 11 orang fungsional yang belum menyampaikan DUPAK.
3. Rata-rata capaian pada IKU Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sebesar 57,54 %. Masih rendahnya rata-rata pencapaian tersebut disebabkan jumlah anggaran yang tersedia sangat terbatas untuk kegiatan peningkatan SDM, jika dibandingkan dengan jumlah PNS yang ada.
4. Rata-rata capaian pada IKU Jumlah pegawai/ Auditor yang mengikuti Sosialisasi, Bimtek dll dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sebesar 130,44%. Pencapaian realisasi sudah mencapai target sebanyak 4 Tahun.

   Rata-rata capaian pada IKU Jumlah PNS yang mengikuti Studi Banding dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sebesar 87,29%. Pencapaian yang belum memenuhi target tersebut disebabkan jumlah anggaran yang tersedia masih sangat terbatas untuk kegiatan peningkatan SDM, jika dibandingkan dengan jumlah PNS yang ada.
5. Rata-rata capaian pada IKU Jumlah obyek periksa dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sebesar 82,03%. Pencapaian realisasi yang belum mencapai target dikarenakan adanya keterbatasan anggaran pengawasan sehingga Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), hanya masuk pada obyek periksa prioritas berdasarkan penilaian risiko.

6. Rata-rata capaian pada IKU Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sebesar 108,64%.
7. Rata-rata capaian pada IKU Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahunan Daerah, Penyusunan PKPT Provinsi dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mencapai 100%. Pencapaian sesuai dengan target, yang dilaksanakan 2 kali yaitu di daerah dan di pusat.
8. Rata-rata capaian pada IKU Persentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti dari tahun 2014 sampai dengan 2018 lebih dari 100%. Pencapaian realisasi tindak lanjut pengaduan masyarakat sangat tergantung pada pengaduan yang masuk serta kriteria pengaduan dan bukti yang ada.
9. Rata-rata capaian pada IKU Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sebesar 84%. Pelaksanaan reviu LKPD hanya dilaksanakan 1 (satu) kali yaitu setelah LKPD selesai disusun dan sebelum diserahkan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
10. Rata-rata capaian pada IKU Jumlah SKPD yang di Evaluasi LAKIP dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mencapai 103,33%. Pada Tahun 2016 dan 2017 persentase capaian kurang dari 100%, akibat adanya perubahan anggaran yang menyebabkan tidak seluruh obyek evaluasi dapat masuk dalam PKPT.
11. Rata-rata capaian pada IKU Jumlah Pegawai wajib dan menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dari tahun 2014 sampai dengan 2017 lebih dari 100%. Pada Tahun 2018 dengan dikeluarkan Permendagri Nomor 6 Tahun 2018 yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang LP2P bagi PNS di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan PNS di Daerah, dengan dicabutnya peraturan tersebut LP2P Tahun 2018 tidak dilaksanakan.

12. Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) mulai dilakukan Tahun 2016 sesuai dengan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rata-rata capaian pada IKU Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA sampai dengan 2018 adalah 100%.
13. Rata-rata capaian pada IKU Jumlah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mencapai 100%.
14. Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan (PAMJAB) baru ditargetkan dan dilaksanakan mulai tahun 2016. Pencapaian PAMJAB telah sesuai dengan kondisi akhir masa jabatan kepala daerah, yaitu sebanya 1 Kabupaten Tahun 2016, 1 Kota pada Tahun 2017 dan 2 Kabupaten pada Tahun 2018.
15. Temuan hasil pemeriksaan APIP dapat inventarisasi dengan baik, rata-rata capaian pada IKU Persentase Inventarisasi Temuan dari tahun 2014 sampai dengan 2018 di atas 100%.
16. Rata-rata capaian pada IKU Persentase Temuan yang telah selesai ditindaklanjuti (Inspektorat) sebesar 97,41%. Capaian setiap tahun persentase penyelesaian di atas 94%, hanya pada tahun 2018 terjadi penurunan akibat dari penyelesaian LHP penyelenggaraan pemerintahan di kab/kota di akhir tahun 2018 sehingga belum bisa ditindaklanjuti.
17. Rata-rata capaian pada IKU Persentase Temuan yang selesai ditindak lanjuti (BPK RI) dari tahun 2015 sampai dengan 2018 sebesar 98,47%. Rata-rata capaian ini kurang dari 100% karena masih banyak temuan lama terkait keuangan dan aset dan melibatkan pihak ke tiga yang sulit diselesaikan.
18. Rata-rata capaian pada IKU Intensitas Pelaksanaan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) dari tahun 2017 sampai dengan 2018 masih belum mencapai 100% karena Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai penyelenggara tidak siap akibat adanya pengurangan anggaran pada kegiatan tersebut. Pada tahun 2016 tidak ada pelaksanaan Larwasda karena tidak ada kab/kota yang bersedia menjadi tuan rumah.
19. Rata-rata capaian pada IKU Persentase Penyelesaian TLHP Inspektorat Jenderal Kemendagri dari tahun 2014 sampai dengan 2018 di atas 100%. Pencapaian ini sudah mencapai sesuai target yang ditentukan.
20. Rata-rata capaian pada IKU Jumlah SKPD yang melaksanakan PMP-RB Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun 2014 sampai dengan 2018

adalah 65,45%. Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 persentase mencapai 100%.

21. Pelaksanaan Perpres No.55 Tahun 2012 setiap tahun dilakukan 4 triwulan, hasil pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan. Capaian pada IKU Laporan Pelaksanaan Perpres No.55 Tahun 2012 dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sebesar 100%.
22. Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan LHKASN dimulai pada tahun 2016, yaitu menghitung realisasi wajib lapor LHKASN yang sudah diverifikasi dengan target jumlah wajib lapor LHKASN pada tahun dimaksud. Rata-rata capaian pada IKU Persentase Fasilitasi Pelaksanaan LHKASN sebesar 96,55%. Untuk Tahun 2016 dan 2018 persentase capaian di atas 100%.
23. Fasilitasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi oleh Inspektorat dengan melakukan penilaian terhadap OPD dalam pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi yang dimulai pada tahun 2016 sampai dengan 2018 mencapai 100% atau lebih.
24. Pelaporan Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi setiap tahunnya di lakukan setiap semester. Capaian pelaksanaan dari IKU tersebut setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2018 sebesar 100%.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran, kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2018, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I	**Belanja Tidak Langsung**	**7.631.431.800**	**9.087.421.400**	**9.719.994.400**	**9.285.973.573**	**9.642.852.354**	**7.267.115.756**	**8.274.048.905**	**9.310.413.197**	**8.997.953.444**	**9.591.658.898**	**95,23**	**91,05**	**95,79**	**96,90**	**99,47**	**6,35**	**7,41**
	Belanja Pegawai	7.631.431.800	9.087.421.400	9.719.994.400	9.285.973.573	9.642.852.354	7.267.115.756	8.274.048.905	9.310.413.197	**8.997.953.444**	9.591.658.898	95,23	91,05	95,79	96,90	99,47	6,35	7,41
II	**Belanja Langsung**	**20.852.590.000**	**21.793.230.800**	**21.823.588.900**	**21.050.000.000**	**17.798.200.000**	**20.664.901.534**	**21.591.857.163**	**21.559.332.347**	**20.864.274.762**	**17.274.748.126**	**99,10**	**99,08**	**98,79**	**99,12**	**97,06**	**(3,59)**	**(4,02)**
	Belanja Pegawai	1.614.965.000	1.395.125.000	1.177.400.000	1.620.566.000	1.534.795.000	1.591.065.000	1.392.266.200	1.171.550.000	1.611.726.000	1.517.506.500	98,52	99,80	99,50	99,45	98,87	0,78	0,84
	Belanja Barang dan Jasa	17.636.175.000	17.999.005.800	17.658.633.900	16.817.243.900	15.668.455.000	17.482.353.534	17.824.067.136	17.441.379.847	16.645.918.862	15.273.581.176	99,13	99,03	98,77	98,98	97,48	(2,86)	(3,25)
	Belanja Modal	1.601.450.000	2.399.100.000	2.987.555.000	2.612.190.100	594.950.000	1.591.483.000	2.375.523.800	2.946.402.500	2.606.629.900	483.660.450	99,38	99,02	98,62	99,79	81,29	(3,89)	(4,92)
CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM																		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.148.412.100	3.132.083.100	3.552.386.900	3.072.121.000	3.309.823.500	3.084.158.840	3.063.590.412	3.405.926.425	2.976.045.150	3.231.708.048	97,96	97,81	95,88	96,87	97,64	1,78	1,62
2.	Program Peningkatan Saranan dan Prasarana	2.563.300.000	3.106.850.000	4.823.873.500	4.225.483.100	1.261.821.500	2.550.049.470	3.080.784.729	4.753901.660	4.190.536.867	1.117.897.644	99,48	99,16	98,55	99,17	88,59	(1,52)	(2,51)
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	188.100.000	75.950.000	141.800.000	91.300.000	-	188.100.000	75.950.000	141.800.000	89.750.000	-	100,00	100,00	100,00	98,30	(2,13)	(2,41)
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	316.897.000	187.471.000	217.734.000	182.657.500	192.957.500	294.245.144	183.213.600	209.016.292	174.365.276	179.367.700	92,85	97,73	96,00	95,46	92,96	(8,79)	(9,34)
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	190.707.000	178.300.000	226.488.000	216.624.000	185.182.500	190.707.000	178.250.000	226.488.000	216.624.000	185.152.500	100,00	99,97	100,00	100,00	99,98	0,41	0,41
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawas dan Manajemen Pemerintahan	3.400.300.000	3.092.895.500	2.165.711.500	2.760.293.000	1.468.863.000	3.390.427.000	3.037.229.390	2.137.868.787	2.744.321.746	1.439.612.649	99,71	98,20	98,71	99,42	98,01	(14,59)	(14,80)

7.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	9.305.060.000	10.730.640.000	9.777.125.000	8.791.209.500	9.904.270.000	9.236.885.530	10.686.406.132	9.770.509.034	8.767.234.791	9.729.807.471	99,27	99,59	99,93	99,73	98,24	2,25	1,96
8.	Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan Internal & Eksternal Pemerintah	1.270.231.000	780.522.000	658.814.250	928.501.900	610.852.000	1.267.138.300	779862.500	657.918.790	926.695.300	607.392.994	99,76	99,92	99,86	99,81	99,43	(11,86)	(11,92)
9.	Program Pemantapan Reformasi Birokrasi	657.682.900	396.369.200	325.505.750	731.310.000	773.130.000	651.290.250	395.470.400	321.753.359	726.651.632	694.059.120	99,03	99,77	98,85	99,36	89,77	18,19	15,86
CAPAIAN KINERJA PENGAWASAN																		
PEMERIKSAAN		**7.315.030.000**	**9.092.461.000**	**8.528.150.000**	**7.423.290.500**	**7.338.531.000**	**7.275.601.030**	**9.084.123.532**	**8.526.107.134**	**7.418.982.582**	**7.270.744.697**	**99,46**	**99,91**	**99,98**	**99,94**	**99,08**	**1,00**	**0,93**
1.	Pengawasan Reguler	5.684.895.000	6.724.599.000	7.332.925.000	5.988.835.500	5.820.520.000	5.662.415.830	6.720.683.032	7.332.013.346	5.986.761.282	5.812.371.437	99,60	99,94	99,99	99,97	99,86		
2.	Pemeriksaan Khusus AMJAB	442.560.000	963.692.000	287.650.000	180.000.000	299.096.000	433.555.000	963.654.400	287.612.900	180.000.000	293.499.400	97,97	100,00	99,99	100,00	98,13		
3.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	680.000.000	321.666.000	180.000.000	210.000.000	247.260.000	675.882.200	318.694.500	179.507.000	208.970.600	219.155.505	99,39	99,08	99,73	99,51	88,63		
4.	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	440.000.000	1.014.929.000	680.000.000	1.000.000.000	889.700.000	436.606.200	1.014.594.600	679.500.000	998.826.200	883.902.356	99,23	99,97	99,93	99,88	99,35		
5.	Pemeriksaan Kas Opname	-	-	-	-	37.500.000	-	-	-	-	37.477.499	-	-	-	-	99,94		
6.	Pendataan dan Penilaian LP2P	67.575.000	67.575.000	47.575.000	44.455.000	44.455.000	67.141.800	66.497.000	47.473.888	44.424.500	24.338.500	99,36	98,40	99,79	99,93	54,75		
REVIU		**168.170.000**	**306.155.000**	**493.550.000**	**526.690.000**	**585.799.500**	**163.020.000**	**290.834.600**	**492.664.600**	**525.972.328**	**581.585.000**	**96,94**	**95,00**	**99,82**	**99,86**	**99,28**	**40,30**	**41,28**
1.	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	168.170.000	306.155.000	493.550.000	298.465.000	240.877.500	163.020.000	290.834.600	492.664.600	297.831.328	240.013.500	96,94	95,00	99,82	99,79	99,64		
2.	Reviu RPJMD, RKPD, dan RKA	-	-	-	228.225.000	252.461.000	-	-	-	228.141.000	249.110.500	-	-	-	99,96	98,67		
3.	Reviu Penyerapan Anggaran dan Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	92.461.000	-	-	-	-	92.461.000	-	-	-	-	100,00		
EVALUASI		**634.820.000**	**651.470.000**	**640.425.000**	**541.540.000**	**1.537.010.000**	**619.420.200**	**642.414.100**	**636.737.300**	**538.717.081**	**1.493.630.654**	**97,57**	**98,61**	**99,42**	**99,48**	**97,18**	**42,33**	**41,17**
1.	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	169.515.000	270.060.000	378.175.000	202.722.500	260.940.000	166.423.000	267.254.100	376.911.000	201.229.581	257.351.728	98,18	98,96	99,67	99,26	98,62		

2.	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	318.155.000	381.410.000	262.250.000	338.817.500	491.333.500	310.630.200	375.160.000	259.826.300	337.487.500	462.125.396	97,63	98,36	99,08	99,61	94,06		
3.	Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan	147.150.000	-	-	-	-	142.367.000	-	-	-	-	96,75	-	-	-	-		
4.	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	-	-	-	-	145.000.000	-	-	-	-	135.334.000	-	-	-	-	93,33		
5.	Monitoring dan dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	-	-	-	528.000.000	-	-	-	-	527.878.000	-	-	-	-	99,98		
6.	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	-	-	-	-	73.780.000	-	-	-	-	72.995.030	-	-	-	-	98,94		
7.	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	-	-	-	-	37.956.500	-	-	-	-	37.946.500	-	-	-	-	99,97		
KONSULTASI		**1.998.812.900**	**1.460.767.700**	**1.124.006.000**	**1.835.207.900**	**1.374.840.000**	**1.998.630.450**	**1.446.479.700**	**1.108.450.309**	**1.829.452.732**	**1.276.324.323**	**100,49**	**99,02**	**98,62**	**99,69**	**92,83**	**(2,58)**	**(4,05)**
1	Fasilitasi dan Konsultasi Hasil Pengawasan	326.230.000	271.610.500	297.330.000	584.330.000	430.570.000	326.320.000	261.020.800	285.572.160	584.102.600	430.491.523	100,03	96,10	96,05	99,96	99,98		
2	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	563.400.000	440.299.000	501.170.250	693.837.900	425.588.000	561.966.300	440.002.500	501.124.790	692.118.500	422.746.284	99,75	99,93	99,99	99,75	99,33		
3	Peningkatan Penyelesaian Kasus dan Penatausahaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	293.498.000	204.538.000	-	-	-	292.185.300	203.403.000	-	-	-	99,55	99,45	-	-	-		
4.	Fasilitasi Pelaksanaan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	278.902.000	147.951.000	-	-	127.692.000	275.340.600	146.583.000	-	-	91.756.000	98,72	99,08	-	-	71,86		
5	Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	257.119.900	196.200.000	86.900.000	56.900.000	56.900.000	274.239.900	195.881.400	85.583.056	55.891.256	55.233.116	106,66	99,84	98,48	98,23	97,07		
6	Fasilitasi Pelaksanaan Perpres No.55 Tahun 2012 (RAD-PPK)	269.663.000	200.169.200	118.500.000	146.800.000	85.800.000	268.578.350	199.589.000	116.258.103	144.535.200	82.403.600	99,60	99,71	98,11	98,46	96,04		
7	Fasilitasi Pelaksanaan LHKASN	-	-	59.261.750	208.450.000	33.450.000	-	-	59.230.800	208.291.200	29.960.200	-	-	99,95	99,92	89,57		
8	Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	-	-	60.844.000	112.640.000	94.750.000	-	-	60.681.400	112.640.000	61.132.000	-	-	99,73	100,00	64,52		

9	Fasilitasi Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi	-	-	-	32.250.000	32.250.000	-	-	-	31.873.976	25.090.000	-	-	-	98,83	77,80		
10	Penanganan Benturan Kepentingan	-	-	-	-	54.000.000	-	-	-	-	43.828.100	-	-	-	-	81,16		
11	Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan pengamanan dan Pembangunan Daerah (TP4D)	-	-	-	-	33.840.000	-	-	-	-	33.683.500	-	-	-	-	99,54		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Tantangan merupakan suatu hal atau objek yang dapat mengunggah tekad atau motivasi untuk meningkatkan kemampuan mengatasi permasalahan dalam organisasi. Tantangan bagi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1) Luasnya wilayah tugas dan jumlah perangkat daerah yang menjadi objek pengawasan

Gambaran rasio pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat terhadap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat diperhitungkan sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ JFA + JPU2P + JFA\ KEPEGAWAIAN}{JUMLAH\ KABUPATEN/KOTA} = \frac{73}{14} = 5{,}21$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, digambarkan bahwa setiap 5,21 atau 5 orang aparatur pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat memiliki beban tanggung jawab melaksanakan pelayanan pembinaan dan pengawasan terhadap 1 kabupaten/ kota, dimana hasilnya adalah berupa jaminan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota efektif dan efisien serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gambaran rasio pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diperhitungkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{umlah Aparatur Pengawasan JFA, JFP2UPD, JFA Kepegawaian)}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} = \frac{73}{45} = 1{,}62$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, digambarkan bahwa setiap 1,62 atau 1-2 orang aparatur pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat memiliki beban tanggung jawab melaksanakan pelayanan pembinaan dan pengawasan terhadap 1 perangkat daerah, dimana hasilnya adalah berupa jaminan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah perangkat daerah efektif dan efisien serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mencapai tujuan organisasi. Perangkat daerah sebanyak 45 OPD, meliputi Lembaga Teknis,

Dinas, dan Badan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan belum memperhitungkan Biro dan UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

2) Kompleksitas program/kegiatan pembinaan dan pengawasan yang menjadi beban tugas dan tanggung jawab Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Program/kegiatan pengawasan (*assurance*) yang menjadi beban tugas dan tanggungjawab Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: audit/pemeriksaan, evaluasi, reviu, pemantauan/ monitoring, dan pengawasan lainnya. Program/kegiatan pembinaan (*consulting*), meliputi: sosialisasi, pembimbingan, konsultansi, dan kegiatan pembinaan lainnya. Proses pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan mulai dari proses perencaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pada pelaporan keuangan maupun kinerja. Selain beban tugas dan tanggung jawab tersebut, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat juga melaksanakan perannya sebagai APIP dalam rangka upaya pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur pengawasan dituntut untuk selalu meningkatkan integritas dan kemampuan serta kompetensinya di berbagai bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3) Perangkat Daerah belum sepenuhnya menerapkan manajemen pengendalian risiko

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dapat terwujud, apabila manajemen pengendalian risiko telah diterapkan pada perangkat daerah. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat selaku APIP salah satu tugas dan fungsinya melakukan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dalam rangka sistem pengendalian intern pemerintah, namun perangkat daerah belum sepenuhnya menetapkan dan menerapkan manajemen pengendalian risiko. Hal ini menjadi tantangan bagi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan pembinaan, agar pelaksanaan pengawasan dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

4) Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum sepenuhnya ditetapkan

Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum sepenuhnya ditetapkan, baik itu berupa ketentuan-ketentuan menyangkut keuangan, kinerja dan lain-lain terkait hal-hal yang menjadi objek pengawasan, bahkan ketentuan yang menyangkut pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya diskresi dan juga tantangan dalam hal penetapan pedoman/standar pelaksanaan pengawasan.

Peluang dapat diartikan sebagai ruang gerak, baik yang konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan. Peluang yang diperoleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1) Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan merupakan keterikatan yang tertuang dalam pernyataan dan dibuktikan dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pimpinan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen melalui visi dan misi yang tertuang di dalam RPJMD, dimana bagian dari visi dan misinya tersebut mengarahkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya melalui perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi lebih berkualitas dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Hal inilah yang menjadi titik fokus sebagaimana peran, tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat melalui program kerjanya yang akan diarahkan untuk mewujudkan hal tersebut.

2) Eksistensi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sebagai APIP

Fungsi pengawasan sangatlah penting dalam organisasi ataupun manajemen, karena melalui pengawasan seluruh kegiatan dapat diarahkan dan dikendalikan agar tetap fokus kepada efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 216 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 bahwa pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Hal ini yang menjadikan Inspektorat Provinsi memiliki peran lebih dalam pelaksanaan tugasnya, selain melakukan pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah di provinsi, juga melakukan pembinaan dan pengawasan pada kabupaten/kota. Peran tugas dan fungsi Inspektorat diuraikan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki peran penting dalam rangka pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi dan memiliki akses koordinasi dengan lembaga-lembaga eksternal, bahkan dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerankan fungsi Inspektorat dengan adanya pelimpahan penanganan pengaduan masyarakat, selain itu adanya perjanjian kerja sama antara Inspektorat, Kejaksaan dan Kepolisian dalam rangka kegiatan Saber Pungli. Ini menunjukkan bahwa eksistensi Inspektorat sangat diperhitungkan dan dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjaga penyelenggaraan pemerintahaan yang baik dan bebas dari korupsi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, bahwa perwujudan peran pengawasan intern yang efektif sekurang-kurangnya harus: (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; (b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Hal tersebut menjadi fokus visi, misi, dan tujuan daerah serta menjadi tuntutan bagi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sebagai APIP untuk mewujudkan adanya perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi lebih berkualitas dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan mengurangi terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.

Beberapa permasalahan yang dapat menjadi penghambat belum terwujudnya visi, misi dan tujuan daerah apabila ditinjau dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun kebelakang serta tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:

1) Masih Kurangnya Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam upaya menegakkan fungsi pengawasan, tindak lanjut laporan hasil pengawasan menjadi sangat penting karena berhasil atau tidaknya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat diketahui dari tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan Pejabat Pengawasan Pemerintah.

Dengan menindak lanjuti laporan hasil pengawasan berarti pemerintah daerah memiliki komitmen untuk memperbaiki kekeliruan maupun kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanpa tindak lanjut maka tujuan pengawasan tidak tercapai yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa, Pertama, Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dan desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan; Kedua, Menteri, Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan; dan Ketiga, Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah ditegaskan dalam pasal 18 bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak menindak lanjuti rekomendasi pejabat pengawas pemerintah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, mencakup: 1. Tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Tindakan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi; 3. Tindakan tuntutan/gugatan; 4. Tindakan pengaduan perbuatan pidana; dan 4. Tindakan penyempurnaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Rendahnya persentase tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi disebabkan beberapa faktor, yakni kurangnya perhatian unit kerja yang menjadi obyek pengawasan, belum adanya sanksi yang tegas terhadap penegakan hukuman disiplin, faktor politis, faktor kolusi dan mutu hasil pengawasan. Untuk mengetahui perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah, maka Inspektorat Provinsi melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas tindak lanjut hasil. Menurut Permendagri Nomor 23 Tahun 2007, rapat pemutakhiran data hasil pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

2) Pedoman/standar pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya ditetapkan

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bagi Inspektorat Daerah Provinsi untuk melakukan perubahan

paradigma pengawasan, yang sebelumnya pemeriksaan lebih kepada *complience audit* (audit ketaatan) beralih menjadi fokus kepada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dimana belum ada penetapan petunjuk pelaksanaan teknisnya yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Instruksi pelaksanaan hanya dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang kebijakan pengawasan setiap tahun. Hal ini dapat berdampak pada terhambatnya pencapaian tujuan pemeriksaan dan akan mempersulit dalam melakukan evaluasi kinerja, karena mekanisme pelaksanaannya belum terstandarisasi.

Begitu pula untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat yang ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, bahwa pelaksanaan pengawasan kabupaten/kota dilaksanakan oleh perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang seharusnya ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun sampai saat ini belum ditetapkan yang berdampak kepada pelaksanaan tugas tersebut menjadi beban tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini akan mempersulit Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dalam menetapkan skala proritas program/kegiatan kedepan.

3) Level Kapabilitas APIP Yang Masih Rendah

Strategi nasional untuk peningkatan kapabilitas APIP difokuskan pada perbaikan regulasi dalam bentuk penyusunan perundang-undangan dan implementasi kebijakan secara nasional, yang meliputi 3 aspek :

1. Penguatan kelembagan APIP dan pengembangan kebijakan independensi dan objektivitas

Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan APIP yang independen dan obyektif sebagaimana diamanatkan pasal 56 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Target yang diharapkan tercapai adalah:

1) Terbitnya undang-undang tentang penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang sampai dengan saat ini masih berupa Rancangan Undang-undang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (RUU SPIP) di Kementerian PAN dan RB.
2) Terimplemetasikannya Internal Audit Charter/Piagam Audit Intern Pemerintah.

3) Terbitnya Standar Kompetensi Pejabat Struktural Pengawasan dan terimplemetasikannya sistem rekrutmen dan seleksi pimpinan APIP.

2. Pengembangan proses bisnis tata laksana pengawasan.

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan serta meningkatkan kualitas hasil - hasil pengawasan. Target yang diharapkan tercapai adalah:

1) Pemberlakuan standar audit intern pemerintah Indonesia, kode etik dan pedoman telaah sejawat sebagai dasar pengembangan kerangka kerja praktik profesi pengawasan intern di Indonesia yang telah disusun dan akan segera ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
2) APIP memiliki sistem dan prosedur perencanaan pengawasan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik.
3) Perencanaan pengawasan telah disusun berbasis risiko.
4) Pelaksanaan pengawasan telah mengarah pada pemberian *assurance* dan *consulting* pada tiga area yaitu tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian.
5) APIP memiliki sistem dan prosedur pengendalian mutu pengawasan.
6) Komunikasi berupa pelaporan hasil pengawasan telah memuat materi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Secara umum, kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target dimaksud antara lain:

1) Pengembangan materi pembinaan dalam bentuk peraturan, pedoman, manual, petunjuk pelaksanaan, practice advisory, buku/booklet mengenai tata kelola APIP yang baik;
2) Workshop / Bimbingan Teknis / Asistensi / pendampingan APIP;
3) Pemetaan / assessment / evaluasi leveling APIP;
4) Pemberlakuan standar audit, kode etik APIP serta pedoman peer review.

3. Pengembangan SDM pengawasan dan profesionalisme auditor.

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan karier SDM. Target yang diharapkan tercapai adalah:

a. Terpenuhinya kebutuhan jumlah Auditor yang kompeten untuk melaksanakan tugas pengawaasan.
b. APIP memiliki dan / atau menerapkan sistem dan prosedur rekrutmen Auditor untuk memperoleh SDM Auditor yang kompeten.
c. Terbentuknya sistem penilaian kinerja individu yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja organisasi.

4) Banyaknya Kegiatan Nasional Yang Dimandatkan Pada Inspektorat

Adapun Kegiatan mandat dari Program Nasional dari Kementerian/Lembaga serta dari KPK-RI, adalah sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi Dana Desa;
2. Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
3. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
4. Fasilitasi Tim SABER PUNGLI;
5. Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
6. Survei Penilaian Integritas.

Banyaknya program prioritas nasional yang harus dilaksanakan membutuhkan sumber daya dalam pelaksanaannya sehingga sumber daya baik finansial dan SDM perlu ditingkatkan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, serta tidak menutup kemungkinan program nasional tersebut akan meningkat setiap tahunnya.

5) Belum Adanya Survei Kepuasan Eksternal

Secara umum kualitas pelayanan Inspektorat pada obyek pengawasan/pelanggan belum pernah dilakukan survei, sehingga kualitas pelayanan belum dapat diukur secara baik. Hasil pelaksanaan survei bermanfaat untuk perbaikan pelayanan di masa yang akan datang, dan juga sebagai tolak ukur (*benchmarking*) dalam pelayanan publik.

6) Peningkatan Maturitas SPIP Belum Optimal

Maturitas SPIP merupakan ukuran kualitas dari sistem pengendalianintern pada suatu organisasi. Penilaian Maturitas mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008 maka pedoman BPKP merinci parameter maturitasnya berdasarkan 25 subunsur SPIP yang diatur dalam PP tersebut. Masing-masing subunsur mempunyai 5 parameter atau indikator maturitas sehingga terdapat 125 buah parameter maturitas SPIP yang disusun tergradasi dari terendah (belum ada) hingga tertinggi (optimum). Adapun penilaian maturitasnya dilakukan melalui:

1. Penilaian pendahuluan, yaitu dengan melakukan survei persepsi maturitas, validasi awal hasil survei dan perhitungan skor awal maturitas SPIP
2. Pengujian bukti maturitas, yaitu dengan mengumpulkan data rinci maturitas SPIP melalui teknik pengumpulan data lainnya seperti kuesioner lanjutan, wawancara, reviu dokumen, atau observasi. Pengumpulan bukti maturitas SPIP ini dilakukan untuk meyakinkan atau memvalidasi bahwa

hasil survei persepsi maturitas telah mencerminkan kondisi tingkat maturitas SPIP yang sebenarnya.

Beberapa persoalan yang dihadapi dalam peningkatan SPIP, antara lain : Rendahnya Disiplin Anggaran; Inefisiensi dan Pemborosan; Rendahnya Kulitas Pelayanan Publik; Permasalahan sebagian Pengadaan Barang dan Jasa; Disharmoni sebagian peraturan; Penyimpangan atas sebagian Pengelolaan Pendapatan dan belanja Negara; dan Rendahnya Kualitas Akuntabilitas Pertanggungjawaban

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Tahun 2018-2023, yaitu:

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”

Pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa dalam masa lima tahun mendatang, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada pembangunan infrastruktur, seperti terbukanya kawasan yang terisolasi dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), terbangunnya jembatan, meningkatnya kualitas jalan yang sudah ada, terbangunnya pelabuhan samudera, terciptanya produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, serta tertopangnya program hilirisasi (industrialisasi), bertambahnya pasokan air bersih, perluasan ruang terbukahijau, dan lain-lain. Selain itu, di masa yang akan datang tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik melalui peningkatan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Sesuai dengan visi, maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan Prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentan kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang.
3. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Inovatif, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. Mewujudkan Masyarakat yang Tertib, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis agama, dan wilayah.

6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan dan permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

3.3. Telaah Renstra Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Visi dari Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Tahun 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, yaitu:

"Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong"

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dengan uraian sebagai berikut :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – *digital bureaucracy*;
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global;
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel;
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas;
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani; dan
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Fokus misi Kementerian PAN RB Deputi Bidang RBKunwas, yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan, serta aparatur yang bersih dan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik sebagai salah satu pilar dari *good governance*.

Adapun tujuan strategis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

adalah terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dengan penjabaran Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja
Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki indeks RB “Baik” (Kategori "B" Ke atas)
Meningkatkan sinergitas pelaksanaan RB nasional	Persentase tindak lanjut rekomendasi Tim RB Nasional (KPRBN, UPRBN, TIRBN dan TPKRBN)
Mewujudkan briokrasi yang akuntabel	Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki Nilai Akuntabilitas Kinerja “Baik” (Kategori "B" Ke atas)
	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Pusat tepat waktu
Mewujudkan birokrasi yang bersih dan berintegritas	Jumlah unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis
	Jumlah IP yang memiliki unit kerja berpredikat WBK/WBBM

Sumber : Renstra Kemenpan-RB Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 2020-2024

Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dalam membantu Gubernur untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan/atau Menteri;
d. pelaksanaan tugas dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat dapat melaksanakan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
g. pengawasan pelaksanaan program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas;
h. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat;
i. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut Inspektorat Provinsi membantu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam indikator kinerja:

a. Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki indeks RB “Baik” (Kategori “B” ke atas);
b. Persentase tindak lanjut rekomendasi Tim RB Nasional (KPRBN, UPRBN,

TIRBN dan TPKRBN) Persentase instansi pemerintah yang SPIP-nya baik;

c. Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik" (Kategori "B" Keatas);
d. Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Pusat tepat waktu;
e. Jumlah unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis; dan
f. Jumlah IP yang memiliki unit kerja berpredikat WBK/WBBM.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tata ruang wilayah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, serta RTRW Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 Kawasan budidaya di Kalimantan Barat meliputi kawasan peruntukan hutan produksi; Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; Kawasan peruntukan hortikultura; Kawasan peruntukan perkebunan; Kawasan peruntukan peternakan; Kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; Kawasan peruntukan industri; Kawasan peruntukan pariwisata; Kawasan peruntukan permukiman; dan Kawasan peruntukan pertahanan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Peran Inspektorat yang merupakan penyelenggara Pemerintahan di Bidang Pengawasan untuk ikut mengawasi setiap program-program yang terkait dengan lingkungan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencegah dampak terhadap lingkungan. Faktor penghambat dalam pengawasan tata ruang dan wilayah adalah belum adanya reviu ataupun evaluasi yang dilaksanakan oleh inspektorat dalam rencana Tata Ruang WilayahProvinsi Kalimantan Barat.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu gambaran mengenai kondisi sekarang dan yang akan dihadapi ke depan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat saat ini dan di tahun mendatang terurai beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. **Belum Maksimalnya Pelaksanaan Sistem Pengendalian**

   Lemahnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada perangkat daerah mengakibatkan terjadinya risiko kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan, baik pada pengelolaan keuangan, aset dan sumber daya.

2. **Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan**

   Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah 60 (enam puluh) hari setelah hasil pemeriksaan diterima. Kesesuaian pelaksanaan pada hasil evaluasi, ditemukan banyak tindak lanjut yang masih belum tepat waktu.

3. **Pengembangan Kemampuan SDM dalam Bidang Pengawasan**

   Pesatnya perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi menuntut pengembangan kemampuan sumber daya manusia. Kemajuan teknologi informasi akan memberikan dampak efektif dan efisien dalam anggaran dan waktu pelaksanaan pengawasan. Peningkatan kemampuan untuk menyiapkan fungsional yang berbasis elektronik perlu perencanaan pengembangan melalui tugas belanja/izin belajar, diklat, pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis dan sebagainya.

4. **Regulasi bidang pengawasan**

   Regulasi atau peraturan perundang-undangan menjadi dasar setiap pelaksanaan dalam pemerintahan. Regulasi dalam pengawasan, secara teknis masih banyak yang belum diatur, sehingga pelaksanaan di lapangan sangat bergantung pada *judgement* fungsional secara personal.

5. **Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta aparat penegak hukum (APH)**

   Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus memiliki hubungan yang selaras sehingga dalam pengawasan dan pembinaan pada obyek pengawasandapat mudah dimengerti. Pelaksanaan hubungan antara APIP dan Aparat Penegak Hukum dipandang perlu adanya kesepahaman dalam menjalankan tugas masing-masing, khususnya dalam penanganan kasus, penilaian kerugian negara/daerah, serta penyelesaian dan/atau tuntutan ganti rugi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, dan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dalam perumusan tujuan dan sasaran selama lima tahun kedepan adalah sebagai upaya dalam pencapaian visi dan misi daerah dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang, kelemahan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki, serta strategi dan arah kebijakan daerah agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan lebih terarah semata-mata untuk mewujudkan visi dan misi daerah dengan mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi, serta kemampuan yang ada.

Ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran dibuktikan dengan tercapainya target indikator kinerja, sesuai dengan penjelasan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Capaian indikator-indikator kinerja juga bermanfaat sebagai bahan evaluasi program/kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi KalimantanBarat

Tujuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, yaitu **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah”**. Pernyataan tujuan tersebut mengandung arti bahwa hasil pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah melalui peningkatan komponen capaian nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

Sasaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, yaitu :

1. **Meningkatnya Nilai SAKIP Pengukuran Kinerja.** Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut adalah Nilai SAKIP Unsur Pengukuran Kinerja.
2. **Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal.** Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut adalah Nilai SAKIP Unsur Evaluasi Internal.
3. **Meningkatnya penilaian Reformasi Birokrasi yaitu area penguatan pengawasan internal.** Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut, antara lain:
   - Level Maturitas SPIP (Level);
   - Level Kapabilitas APIP; dan
   - Nilai Persepsi Korupsi.

Tabel 4.1
Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
1	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja**			**Nilai SAKIP Unsur Pengukuran Kinerja**	**13,72**	**14.44**	**15.00**	**15.50**	**15.50**	**16.50**	**16.50**		
				Meningkatnya Efektifitas Kinerja Pemerintah Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Kinerja Pemda**	**-**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**		
			6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**	100	100	100	100	-	-	-	Inspektorat	Pemprov Kalbar
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	88	89	90	91	-	-	-		
					Persentase Tindak Lanjut Pengaduan/Kasus	88	89	90	92	-	-	-		
			6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**	-	-	-	-	80	80	80	Inspektorat	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Tersedianya Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan**	**318**	**318**	**318**	**318**	**-**	**-**	**-**	**IRBAN IV**	

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Jumlah Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**80**	**80**	**IRBAN IV**	
			6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	225	225	225	225	-	-	-	Sekretaris, Irban I-IV	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	-	110	110	220	Sekretaris, Irban I-IV	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	26	26	26	26	-	-	-	Irban III, Irban IV	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-	-	-	-	2	2	4	Irban V	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum Dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan Pengawasan Umum Dan Teknis Kabupaten/Kota	14	14	14	14	-	-	-	Sekretaris, Irban I-IV	Kab/Kota
			6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum Dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	-	-	-	-	11	11	22	Sekretaris, Irban I-IV	Kab/Kota
			6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Tersedianya Mou Kerjasama Pengawasan Internal	2	2	2	2	-	-	-	Subag ADUM	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-	-	-	-	2	2	4	Subag ADUM	Pemprov Kalbar
		Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Penilaian Internal			**Nilai SAKIP Unsur Evaluasi Internal**	**6.32**	**6,62**	**7,32**	**7,62**	**8,32**	**8,62**	**8,62**		

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
				Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dan PDTT	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Keuangan Pemda**		**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**		
			6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**	100	100	100	100	-	-	-	Inspektorat	Pemprov Kalbar
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	88	89	90	91	-	-	-		
					Persentase Tindak Lanjut Pengaduan/Kasus	88	89	90	92	-	-	-		
			6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**	-	-	-	-	80	80	**80**	Inspektorat	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Tersedianya Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan**	**318**	**318**	**318**	**318**	**-**	**-**	**-**	**IRBAN IV**	
			6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Jumlah Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**80**	**80**	**IRBAN IV**	
			6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	26	26	26	26	-	-	-	Irban III, Irban IV	Pemprov Kalbar

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	31	31	62	Irban III, Irban IV	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Reviu Laporan Keuangan	3	3	3	3	-	-	-	Irban I, Irban III	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-	-	-	-	3	3	6	Irban I, Irban III	Pemprov Kalbar
					Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**		
			6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**	100	100	100	100	-	-	-	Inspektorat	Pemprov Kalbar
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	88	89	90	91	-	-	-		
					Persentase Tindak Lanjut Pengaduan/Kasus	88	89	90	92	-	-	-		
			6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**	-	-	-	-	80	80	80	Inspektorat	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.02	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Tersedianya Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Dengan Tujuan Tertentu**	**124**	**124**	**124**	**124**	**-**	**-**	**-**	**IRBAN V**	

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.02.1.02	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Jumlah Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Dengan Tujuan Tertentu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**80**	**80**	**IRBAN V**	
			6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Berita Acara Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	10 BA	10 BA	10 BA	10 BA	-	-	-	Sekretaris	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	114	114	114	114	-	-	-	Irban V	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	-	-	54	54	108	Irban V	Pemprov Kalbar
				Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan**		**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**		
			6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**	100	100	100	100	-	-	-	Inspektorat	Pemprov Kalbar
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	88	89	90	91	-	-	-		
					Persentase Tindak Lanjut Pengaduan/Kasus	88	89	90	92	-	-	-		

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**	-	-	-	-	80	80	80	Inspektorat	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Tersedianya Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan**	**318**	**318**	**318**	**318**	**-**	**-**	**-**	**IRBAN IV**	
			6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Jumlah Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**80**	**80**	**IRBAN IV**	
			6.01.02.1.01.07	Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	8	8	8	8	-	-	-	Sekretaris	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01.07	Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-	-	-	-	3	3	6	Sekretaris	Pemprov Kalbar
			06.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	0	100	100	100	-	-	-		
					Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	0	100	100	100	-	-	-		

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			06.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan**	0	-	-	-	80	80	80		
			6.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan**	**Rumusan Kebijakan Teknis Pengawasan**	**3**	**4**	**5**	**6**	**-**	**-**	**-**	**Irban 1**	
			6.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**80**	**80**	**Irban 1**	
			6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Pengawasan	3	4	5	6	-	-	-	Subag PKA	Pontianak
			6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-	-	-	-	4	4	8	Sekretaris	Pontianak
			6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Bidang Fasilitasi Pengawasan	13	13	13	13	-	-	-	Subag PKA	Pontianak
			6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	-	-	-	-	13	13	26	Sekretaris	Pontianak
			6.01.03.1.02	**Pendampingan Dan Asistensi**	**Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	**162**	**162**	**162**	**162**	**-**	**-**	**-**	**Irban II**	

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.03.1.02	**Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**80**	**80**	**Irban II**	
			6.01.03.1.02.01	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Dan Pendampingan Urusan Pemda	129	129	129	129	-	-	-	Irban II, Sekretaris, Subag ADUM	Pemprov Kalbar
			6.01.03.1.02.01	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	92	92	184	Irban II, Sekretaris, Subag ADUM	Pemprov Kalbar
			6.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu**	100	100	100	100	-	-	-		
					Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	100	100	100	100	-	-			
					Persentase pelayanan administrasi Umum sesuai prosedur	100	100	100	100	-	-	-		
					Presentase Penatausahaan Aset yang Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	-	-	-		
					Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur	100	100	100	100	-	-	-		

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
					Presentase Nilai Kepuasan Layanan Internal	100	100	100	100	-	-	-		
					Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar	100	100	100	100	-	-	-		
					Presentase pemenuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	-	-	12	12	-	-	-		
					Presentase terpeliharanya barang milik daerah untuk untuk menunjang kerja perangkat daerah	-	-	100	100	-	-	-		
			6.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu**	-	-	-	-	80	80	80		
			6.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**22**	**22**	**22**	**22**	**-**	**-**	**-**	**Sekretaris, Subag PKA**	
			6.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**80**	**80**	**Sekretaris, Subag PKA**	

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Ketentuan dan tepat waktu	1	1	1	1	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang sesuai dengan Ketentuan dan tepat waktu	1	1	1	1	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang sesuai dengan Ketentuan dan tepat waktu	1	1	1	1	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang sesuai dengan Ketentuan dan tepat waktu	1	1	1	1	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.01.1.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-Skpd	1	1	1	1	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	5	5	5	5	-	-	-	Sekretaris	Pontianak
			6.01.01.1.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	5	5	10	Sekretaris	Pontianak
			6.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	12	12	12	12	60	Sekretaris	Pontianak
			6.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18**	**18**	**18**	**18**	**-**	**-**	**-**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**80**	**80**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	120	120	240	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Penunjang Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	1	1	1	1	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.06	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	2	2	2	2	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.01.1.02.06	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	-	-	2	2	4	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Teran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Teran Skpd	11	11	11	12	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	11	11	22	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Tersediannya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**16**	**16**	**16**	**16**	**-**	**-**	**-**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**80**	**80**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd	1	1	1	1	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	9	9	9	9	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	10	10	20	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah	4	4	4	4	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	4	4	8	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd	2	2	2	2	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	2	2	4	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2 keg**	**2 keg**	**2 keg**	**2 keg**	**-**	**-**	**-**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**80**	**80**	**Sekretaris**	

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas buat ASN sesuai Ketentuan	136	136	136	136	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	0	0	0	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.03	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Data Administrasi Kepegawaian	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.03	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	12	12	24	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.04	Koordinasi Dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.04	Koordinasi Dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	2	2	2	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	4	4	8	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.06	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Yang Dipulangkan/Pensiun	5	5	5	5	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.01.1.05.06	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-	-	-	-	1	3	4	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum**	**9**	**9**	**9**	**9**	**-**	**-**	**-**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Kegiatan Administrasi Umum**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**80**	**80**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	3	3	6	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	6	6	12	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya Makanan Dan Minuman Rapat Kantor	5000	5000	5000	5000	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	2000	2000	4000	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	-	3	3	6	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersediannya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	-	48	48	96	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Dan Pelayanan Kunjungan Tamu	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Terselenggaranya Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris	Pontianak
			6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris	Pontianak
			6.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	118	118	118	200	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	118	118	235	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah**	**130**	**130**	**130**	**130**	**-**	**-**	**-**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**80**	**80**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	105	105	105	105	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	105	105	210	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	57	57	57	57	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	10	10	20	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3**	**3**	**3**	**3**	**-**	**-**	**-**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**80**	**80**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	-	12	12	24	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	13	13	26	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**12**	**12**	**12**	**-**	**-**	**-**	**Sekretaris**	

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**PersentasePemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**80**	**80**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	1	1	1	1	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	15	15	15	15	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	15	15	30	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	154	154	154	154	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	4	4	8	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	181	181	181	181	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	188	188	376	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12	12	12	12	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	5	5	10	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1	1	1	1	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	-	-	2	2	4	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	5	5	5	5	-	-	-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	1	1	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
		Meningkatnya Penilaian Reformasi Birokrasi, yaitu Area Penguatan Pengawasan			**Level kapabilitas APIP**	**level 3**	**level 3**	**level 3**	**level 3**	**level 3**	**Level 4**	**Level 4**		
				Meningkatnya Efektivitas Kapabilitas APIP Daerah	**Persentase Peningkatan Kapabilitas APIP**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**		
			6.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu**	100	100	100	100	-	-	-		

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
					Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	100	100	100	100	-	-	-		
					Persentase pelayanan administrasi Umum sesuai prosedur	100	100	100	100	-	-	-		
					Presentase Penatausahaan Aset yang Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	-	-	-		
					Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur	100	100	100	100	-	-	-		
					Presentase Nilai Kepuasan Layanan Internal	100	100	100	100	-	-	-		
					Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar	100	100	100	100	-	-	-		
					Presentase pemenuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	-	-	12	12	-	-	-		
					Presentase terpeliharanya barang milik daerah untuk untuk menunjang kerja perangkat daerah	-	-	100	100	-	-	-		
			6.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**80**	**80**		
			6.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2 keg**	**2 keg**	**2 keg**	**2 keg**	**-**	**-**	**-**	**Sekretaris**	

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**80**	**80**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	2	2	2	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	4	4	4	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	105	105	105	123	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	200	220	420	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	215	215	215	215	-	-	-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	117	117	234	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
					Level Kapabilitas Maturitas SPIP	**level 3**	**level 3**	**level 3**	**level 3**	**level 3**	**level 4**	**level 4**		
				Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan SPIP	**Persentase Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**		
			06.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	0	100	100	100	-	-	-		
					Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	0	100	100	100	-	-	-		
			06.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	-	-	-	-	80	80	80		
			6.01.03.1.02	**Pendampingan Dan Asistensi**	**Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	**162**	**162**	**162**	**162**	**-**	**-**	**-**	**Irban II**	
			6.01.03.1.02	**Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**80**	**80**	**Irban II**	
			6.01.03.1.02.01	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Dan Pendampingan Urusan Pemda	129	129	129	129	-	-	-	Irban II, Sekretaris, Subag ADUM	Pemprov Kalbar

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.03.1.02.01	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	92	92	184	Irban II, Sekretaris, Subag ADUM	Pemprov Kalbar
					Nilai Persepsi Korupsi	**5,79**	**6,17**	**6,3**	**6,4**	**6,5**	**6,6**	**6,6**		
				Meningkatnya Efektivitas Pembinaaan dan Pengawasan terhadap Integritas Pelayanan Daerah	**Persentase Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi**	**-**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**		
			06.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	-	100	100	100	-	-	-		
					Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	-	100	100	100	-	-	-		
			06.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	-	-	-	-	80	80	160		
			6.01.03.1.02	**Pendampingan Dan Asistensi**	**Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	**162**	**162**	**162**	**162**	**-**	**-**	**-**	**Irban II**	

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.03.1.02	**Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**80**	**80**	**Irban II**	
			6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2	2	2	2	-	-	-	Irban IV	Pemprov Kalbar
			6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	90	90	180	Irban IV	Pemprov Kalbar
					Persentase Penyelenggaraan Pengawasan terhadap Integritas Pelayanan Daerah	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**		
			06.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	-	100	100	100	-	-	-		
					Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	-	100	100	100	-	-	-		
			06.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	-	-	-	-	80	80	80		

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.03.1.02	**Pendampingan Dan Asistensi**	**Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	**162**	**162**	**162**	**162**	**-**	**-**	**-**	**Irban II**	
			6.01.03.1.02	**Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**80**	**80**	**Irban II**	
			6.01.03.1.02.01	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Dan Pendampingan Urusan Pemda	129	129	129	129	-	-	-	Irban II, Sekretaris, Subag ADUM	Pemprov Kalbar
			6.01.03.1.02.01	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	92	92	184	Irban II, Sekretaris, Subag ADUM	Pemprov Kalbar
			6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	6	6	6	6	-	-	-	Irban I, Irban III	Pemprov Kalbar
			6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	-	-	-	5	5	10	Irban I, Irban III	Pemprov Kalbar
			6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	25	25	25	25	-	-	-	Irban I, Irban II, Irban V ADUM	Pemprov Kalbar

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
			6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	-	-	-	141	141	28	Irban I, Irban II, Irban V ADUM	Pemprov Kalbar

Tabel 4.2
Indikator Kinerja dan Rumus

No.	INDIKATOR	RUMUS
1	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Capaian Dokumen}}{\text{Total Target Dokumen}} \text{ x } 100\%$
2	Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Capaian Dokumen Administrasi Keuangan}}{\text{Total Target Dokumen Administrasi}} \text{ x } 100\%$
3	Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Capaian Dokumen Administrasi BMD}}{\text{Total Target Dokumen Administrasi BMD}} \text{ x } 100\%$
4	Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Capaian Dokumen Kepegawaian}}{\text{Total Target Dokumen Kepegawaian}} \text{ x } 100\%$
5	Persentase Kegiatan Administrasi Umum	$\frac{\text{Jumlah Capaian Dokumen Administrasi Umum}}{\text{Total Target Dokumen Administrasi Umum}} \text{ x } 100\%$
6	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah	$\frac{\text{Jumlah BMD yang tersedia}}{\text{Total Target BMD yang tersedia}} \text{ x } 100\%$
7	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan}}{\text{Total Target Doumen Jasa Penunjang Urusan}} \text{ x } 100\%$
8	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Capaian Pemeliharaan BMD}}{\text{Total Target Dokumen Pemeliharaan BMD}} \text{ x } 100\%$
9	Persentase Jumlah Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan	$\frac{\text{Jumlah Capaian Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan}}{\text{Total Target Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan}} \text{ x } 100\%$
10	Persentase Jumlah Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Dengan Tujuan Tertentu	$\frac{\text{Jumlah Capaian Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu}}{\text{Total Target Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu}} \text{ x } 100$
11	Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kebijakan Teknis Pengawasn}}{\text{Total Target Kebijakan Teknis Pengawasan}} \text{ x } 100\%$
12	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	$\frac{\text{Jumlah Capaian Rekomendasi, Asistensi, danPendampingan}}{\text{Total Target Rekomendasi, Asistensi, dan Pendampingan}} \text{ x } 100\%$

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran, sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka fikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagai relevansi dan konsistensi antara visi dan misi sebagaimana RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13	Kepmendagri Noomor 050-5889
										Tahun 2006	Tahun 2021
1		2		3		4		5	6	7	8
2		**MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERKUALITAS DENGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE**									
INSPEKTORAT DAERAH											
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	2.1.14.1	Peningkatan kinerja rutin pengawasan	2.1.14.1.1	Meningkatkan kualitas reviu dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan dan kinerja	INSPEKTORAT	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA RUTIN PENGAWASAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
				Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	2.1.14.2	Peningkatan pengawasan prioritas nasional	2.1.14.2.1	Optimalisasi monitoring dan evaluasi dana BOS dan dana desa	INSPEKTORAT	PROGRAM PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
				Meningkatnya penilaian Reformasi Birokrasi yaitu area penguatan pengawasan internal			2.1.14.2.2	Optimalisasi evaluasi perencanaan dan penganggaran *responsif gender*	INSPEKTORAT	PROGRAM PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
							2.1.14.2.3	Optimalisasi partisipasi kegiatan pencegahan anti korupsi	INSPEKTORAT	PROGRAM PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN , PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

No		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13	Kepmendagri Noomor 050-5889
										Tahun 2006	Tahun 2021
1		2		3		4		5	6	7	8
2		**MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERKUALITAS DENGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE**									
					2.1.14.3	Peningkatan kapabilitas APIP	2.1.14.3.1	Meningkatkan Kapabilitas APIP	INSPEKTORAT	PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
							2.1.14.3.2	Penyusunan pedoman/standar pengawasan internal	INSPEKTORAT	PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN , PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
							2.1.14.3.3	Meningkatkan pelayanan melalui survey kepuasan eksternal	INSPEKTORAT	PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)	-
					2.1.14.4	Peningkatan pengawasan reformasi birokrasi	2.1.14.4.1	Optimalisasi penilaian mandiri reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan masyarakat	INSPEKTORAT	PROGRAM PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN , PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
					2.1.14.5	Peningkatan penegakan integritas	2.1.14.5.1	Optimalisasi penanganan laporan gratifikasi dan monev aksi pencegahan korupsi	INSPEKTORAT	PROGRAM PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN , PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
							2.1.14.5.2	Optimalisasi evaluasi pelaporan RAD PPK dan penilaian ZI	INSPEKTORAT	PROGRAM PENEGAKAN INTEGRITAS	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN , PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

No		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13	Kepmendagri Noomor 050-5889
										Tahun 2006	Tahun 2021
1		2		3		4		5	6	7	8
2		**MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERKUALITAS DENGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE**									
							2.1.14.5.3	Melaksanakan verifikasi LHKASN/ LHKPN	INSPEKTORAT	PROGRAM PENEGAKAN INTEGRITAS	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN , PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
							2.1.14.5.4	Penanganan benturan kepentingan	INSPEKTORAT	PROGRAM PENEGAKAN INTEGRITAS	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN , PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
				Meningkatnya Nilai SAKIP Pengukuran Kinerja	2.1.14.6	Peningkatan nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja	2.1.14.6.1	Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja minimal 75 % dari Perangkat Daerah nilai A	INSPEKTORAT	PROGRAM PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program, dan Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Rencana program dan kegiatan Perubahan Inspektorat Provinsi Kalimantan BaratTahun 2018-2023 sebagai relevansi pencapaian tujuan dan sasaran dan sesuaitugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Program Kinerja Rutin Pengawasan, meliputi kegiatan: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler/kinerja perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP.
2) Program Pengawasan Prioritas Nasional, meliputi kegiatan: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan pengganggaran responsif gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, dan peyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
3) Program Pengawalan Reformasi Birokrasi, meliputi kegiatan: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap bupati/wali kota untuk Inspektorat Provinsi dan terhadap pemerintahan desa untuk Inspektorat Kabupaten/Kota, dan evaluasi pelayanan publik.

4) Program penegakan integritas, meliputi kegiatan: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan.
5) Program Peningkatan Kapabilitas APIP, meliputi kegiatan: bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan untuk APIP, penyusunan pedoman/standar pengawasan internal dan survey kepuasan eksternal.

Indikator kinerja program dan kegiatan serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:

Tabel 6.1
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
1	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja**			**Nilai SAKIP Unsur Pengukuran Kinerja**	**13,72**	**14.44**		**15.00**		**15.50**		**15.50**		**16.50**		**16.50**		
				Meningkatnya Efektifitas Kinerja Pemerintah Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Kinerja Pemda**	-	**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		
			6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**	100	100	11.814	100	15.721	100	9.785	-		-		-	Inspektorat	Pemprov Kalbar
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	88	89		90		91		-		-		-		
					Persentase Tindak Lanjut Pengaduan/Kasus	88	89		90		92		-		-		-		
			6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**	-	-		-		-		80	6.572	80	6.572	80	Inspektorat	Pemprov Kalbar

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Tersedianya Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan**	**318**	**318**	**9.382**	**318**	**12.110**	**318**	**6.013**	**-**		**-**		**-**	**IRBAN IV**	
			6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Jumlah Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan**	**-**	**-**		**-**		**-**		**80**	**4.174**	**80**	**4.174**	**80**	**IRBAN IV**	
			6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	225	225	7.315	225	9.367	225	3.427	-		-		-	Sekretaris, Irban I-IV	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-		-		-		110	2.142	110	2.142	220	Sekretaris, Irban I-IV	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	26	26	720	26	870	26	484	-		-		-	Irban III, Irban IV	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-	-		-		-		2	75	2	75	4	Irban V	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum Dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan Pengawasan Umum Dan Teknis Kabupaten/Kota	14	14	0	14	0	14	860	-		-		-	Sekretaris, Irban I-IV	Kab/Kota
			6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum Dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	-	-		-		-		11	564	11	564	22	Sekretaris, Irban I-IV	Kab/Kota
			6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Tersedianya Mou Kerjasama Pengawasan Internal	2	2	0	2	0	2	58	-		-		-	Subag ADUM	Pemprov Kalbar

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-	-		-		-		2	61	2	61	4	Subag ADUM	Pemprov Kalbar
		Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Penilaian Internal			**Nilai SAKIP Unsur Evaluasi Internal**	**6.32**	**6,62**		**7,32**		**7,62**		**8,32**		**8,62**		**8,62**		
				Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dan PDTT	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Keuangan Pemda**		**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		
			6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**	100	100	11.814	100	15.721	100	9.785	-		-		-	Inspektorat	Pemprov Kalbar
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	88	89		90		91		-		-		-		
					Persentase Tindak Lanjut Pengaduan/Kasus	88	89		90		92		-		-		-		
			6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**	-	-		-		-		80	6.572	80	6.572	**80**	Inspektorat	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Tersedianya Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan**	**318**	**318**	**9.382**	**318**	**12.110**	**318**	**6.013**	**-**		**-**		**-**	**IRBAN IV**	

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Jumlah Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan**	**-**	**-**		**-**		**-**		**80**	**4.174**	**80**	**4.174**	**80**	**IRBAN IV**	
			6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	26	26	720	26	870	26	484	-		-		-	Irban III, Irban IV	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-		-		-		31	490	31	490	62	Irban III, Irban IV	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Reviu Laporan Keuangan	3	3	489	3	537	3	275	-		-		-	Irban I, Irban III	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-	-		-		-		3	209	3	209	6	Irban I, Irban III	Pemprov Kalbar
					Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		
			6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**	100	100	11.814	100	15.721	100	9.785	-		-		-	Inspektorat	Pemprov Kalbar
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	88	89		90		91		-		-		-		
					Persentase Tindak Lanjut Pengaduan/Kasus	88	89		90		92		-		-		-		

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**	-	-		-		-		80	6.572	80	6.572	80	Inspektorat	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.02	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Tersedianya Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Dengan Tujuan Tertentu**	**124**	**124**	**2.432**	**124**	**3.611**	**124**	**3.772**	**-**		**-**		**-**	**IRBAN V**	
			6.01.02.1.02	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Jumlah Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Dengan Tujuan Tertentu**	**-**	**-**		**-**		**-**		**80**	**2.398**	**80**	**2.398**	**80**	**IRBAN V**	
			6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Berita Acara Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	10 BA	10 BA	244	10 BA	267	10 BA	169	-		-		-	Sekretaris	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-	-		-		-		1	169	1	169	2	Sekretaris	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	114	114	2.188	114	3.344	114	3.603	-		-		-	Irban V	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-		-		-		54	2.229	54	2.229	108	Irban V	Pemprov Kalbar

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan**		**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		
			6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**	100	100	11.814	100	15.721	100	9.785	-		-		-	Inspektorat	Pemprov Kalbar
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	88	89		90		91		-		-		-		
					Persentase Tindak Lanjut Pengaduan/Kasus	88	89		90		92		-		-		-		
			6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**	-	-		-		-		80	6.572	80	6.572	80	Inspektorat	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Tersedianya Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan**	**318**	**318**	**9.382**	**318**	**12.110**	**318**	**6.013**	**-**		**-**		**-**	**IRBAN IV**	
			6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Jumlah Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan**	**-**	**-**		**-**		**-**		**80**	**4.174**	**80**	**4.174**	**80**	**IRBAN IV**	

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.02.1.01.07	Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	8	8	859	8	1066	8	824	-		-		-	Sekretaris	Pemprov Kalbar
			6.01.02.1.01.07	Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-	-		-		-		3	629	3	629	6	Sekretaris	Pemprov Kalbar
			06.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	0	100	1.144	100	3.524	100	2.842	-		-		-		
					Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	0	100		100		100		-		-		-		
			06.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan**	0	-		-		-		80	2.764	80	2.764	80		
			6.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan**	**Rumusan Kebijakan Teknis Pengawasan**	**3**	**4**	**212**	**5**	**517**	**6**	**455**	**-**		**-**		**-**	**Irban 1**	
			6.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan**	**-**	**-**		**-**		**-**		**80**	**300**	**80**	**300**	**80**	**Irban 1**	

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Pengawasan	3	4	53	5	173	6	76	-		-		-	Subag PKA	Pontianak
			6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-	-		-		-		4	57	4	57	8	Sekretaris	Pontianak
			6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Bidang Fasilitasi Pengawasan	13	13	159	13	344	13	379	-		-		-	Subag PKA	Pontianak
			6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	-	-		-		-		13	242	13	242	26	Sekretaris	Pontianak
			6.01.03.1.02	**Pendampingan Dan Asistensi**	**Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	**162**	**162**	**932**	**162**	**3007**	**162**	**2.387**	**-**		**-**		**-**	**Irban II**	
			6.01.03.1.02	**Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	**-**	**-**		**-**		**-**		**80**	**2.463**	**80**	**2.463**	**80**	**Irban II**	
			6.01.03.1.02.01	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Dan Pendampingan Urusan Pemda	129	129	198	129	397	129	373	-		-		-	Irban II, Sekretaris, Subag ADUM	Pemprov Kalbar
			6.01.03.1.02.01	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-		-		92	355	92	355	184	Irban II, Sekretaris, Subag ADUM	Pemprov Kalbar

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu**	100	100	5.797	100	8.522	100	23.294	-		-		-		
					Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	100	100		100		100		-		-				
					Persentase pelayanan administrasi Umum sesuai prosedur	100	100		100		100		-		-		-		
					Presentase Penatausahaan Aset yang Sesuai Ketentuan	100	100		100		100		-		-		-		
					Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur	100	100		100		100		-		-		-		
					Presentase Nilai Kepuasan Layanan Internal	100	100		100		100		-		-		-		
					Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar	100	100		100		100		-		-		-		

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Presentase pemenuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	-	-		12		12		-		-		-		
					Presentase terpeliharanya barang milik daerah untuk untuk menunjang kerja perangkat daerah	-	-		100		100		-		-		-		
			6.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu**	-	-		-		-		80	28.287	80	28.287	80		
			6.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**22**	**22**	**182**	**22**	**177**	**22**	**319**	**-**		**-**		**-**	**Sekretaris, Subag PKA**	
			6.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**		**-**		**-**		**80**	**361**	**80**	**361**	**80**	**Sekretaris, Subag PKA**	
			6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Ketentuan dan tepat waktu	1	1	52	1	35	1	25	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-		-		-		1	25	1	25	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.01.1.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang sesuai dengan Ketentuan dan tepat waktu	1	1	9	1	9	1	9	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-		-		-		1	21	1	21	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang sesuai dengan Ketentuan dan tepat waktu	1	1	9	1	9	1	9	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-		-		-		1	21	1	21	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang sesuai dengan Ketentuan dan tepat waktu	1	1	9	1	9	1	9	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-		-		-		1	21	1	21	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-Skpd	1	1	9	1	9	1	9	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.01.1.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-		-		-		1	22	1	22	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	5	5	0	5	0	5	136	-		-		-	Sekretaris	Pontianak
			6.01.01.1.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-		-		-		5	126	5	126	10	Sekretaris	Pontianak
			6.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	95	12	107	12	118	12	123	12	123	60	Sekretaris	Pontianak
			6.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18**	**18**	**229**	**18**	**222**	**18**	**17.022**	**-**		**-**		**-**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**		**-**		**-**		**80**	**23.151**	**80**	**23.151**	**80**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN	12	12	0	12	0	12	16.493	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-		-		-		120	22.667	120	22.67	240	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Penunjang Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	12	12	6	12	19	12	13	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-		-		-		1	8	1	8	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	12	12	188	12	168	12	416	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-		-		-		1	365	1	365	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	1	1	7	1	7	1	10	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-		-		-		1	9	1	9	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.01.1.02.06	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	2	2	0	2	0	2	14	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.06	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-		-		-		2	22	2	22	4	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Teran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semes Teran Skpd	11	11	28	11	28	12	74	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-		-		-		11	79	11	79	22	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Tersediannya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**16**	**16**	**23**	**16**	**43**	**16**	**100**	**-**		**-**		**-**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**-**	**-**		**-**		**-**		**80**	**117**	**80**	**117**	**80**	**Sekretaris**	

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd	1	1	0	1	0	1	8	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-		-		-		1	20	1	20	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	9	9	23	9	43	9	51	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-		-		-		10	51	10	51	20	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah	4	4	0	4	0	4	27	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-		-		-		4	26	4	26	8	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd	2	2	0	2	0	2	14	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-		-		-		2	19	2	19	4	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2 keg**	**2 keg**	**997**	**2 keg**	**1744**	**2 keg**	**1.091**	**-**		**-**		**-**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**		**-**		**-**		**80**	**632**	**80**	**632**	**80**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas buat ASN sesuai Ketentuan	136	136	157	136	308	136	83	-		-		-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-		-		-		0	0	0	0	0	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.03	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Data Administrasi Kepegawaian	12	12	0	12	0	12	80	-		-		-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.03	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-		-		-		12	35	12	35	24	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.04	Koordinasi Dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian	12	12	0	12	0	12	27	-		-		-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.04	Koordinasi Dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-		-		-		1	18	1	18	2	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	2	68	2	74	2	14	-		-		-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-		-		-		4	108	4	108	8	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.06	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Yang Dipulangkan/Pensiun	5	5	0	5	44	5	28	-		-		-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.06	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-	-		-		-		1	15	3	15	4	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum**	**9**	**9**	**1.955**	**9**	**2.407**	**9**	**1.601**	**-**		**-**		**-**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Kegiatan Administrasi Umum**	**-**	**-**		**-**		**-**		**80**	**1.306**	**80**	**1.306**	**80**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	49	12	61	12	88	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-		-		-		1	63	1	63	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12	12	500	12	730	12	427	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-		-		-		3	293	3	293	6	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	12	20	12	30	12	126	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-		-		-		6	150	6	150	12	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya Makanan Dan Minuman Rapat Kantor	5000	5000	237	5000	237	5000	90	-		-		-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-		-		-		2000	120	2000	120	4000	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	12	12	216	12	343	12	189	-		-		-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-		-		-		3	178	3	178	6	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersediannya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12	12	11	12	46	12	48	-		-		-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-		-		-		48	45	48	45	96	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Dan Pelayanan Kunjungan Tamu	12	12	158	12	158	12	120	-		-		-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-		-		-		1	90	1	90	2	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Terselenggaranya Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	12	12	608	12	790	12	400	-		-		-	Sekretaris	Pontianak
			6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-		-		-		1	250	1	250	2	Sekretaris	Pontianak
			6.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	118	118	10	118	11	200	38	-		-		-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-		-		-		118	47	118	47	235	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	12	12	146	12	0	12	71	-		-		-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-		-		-		1	67	1	67	2	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah**	**130**	**130**	**750**	**130**	**867**	**130**	**317**	**-**		**-**		**-**	**Sekretaris**	

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah**	**-**	**-**		**-**		**-**		**80**	**34**	**80**	**34**	**80**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	105	105	215	105	124	105	188	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-		-		-		105	0	105	0	210	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	57	57	535	57	743	57	128	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-		-		-		10	34	10	34	20	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3**	**3**	**790**	**3**	**933**	**3**	**1.470**	**-**		**-**		**-**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**		**-**		**-**		**80**	**1.629**	**80**	**1.629**	**80**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	12	9	12	10	12	8	-		-		-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-		-		-		1	12	1	12	2	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12	12	426	12	520	12	525	-		-		-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-		-		-		12	482	12	482	24	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	355	12	402	12	936	-		-		-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-		-		-		13	1.133	13	1.133	26	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**12**	**871**	**12**	**2.130**	**12**	**1.370**	**-**		**-**		**-**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**PersentasePemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**		**-**		**-**		**80**	**530**	**80**	**530**	**80**	**Sekretaris**	

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	1	1	42	1	85	1	23	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	-		-		-		1	21	1	21	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	15	15	127	15	255	15	152	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-		-		-		15	139	15	139	30	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	154	154	0	154	0	154	35	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-		-		-		4	20	4	20	8	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	181	181	115	181	205	181	207	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-		-		-		188	160	188	160	376	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12	12	0	12	0	12	2	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-		-		-		5	3	5	3	10	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1	1	0	1	0	1	10	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-		-		-		2	26	2	26	4	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	5	5	587	5	1.585	5	939	-		-		-	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
			6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-		-		-		1	160	1	160	2	Sekretaris, Subag PKA	Pontianak
		Meningkatnya Penilaian Reformasi Birokrasi, yaitu Area Penguatan Pengawasan			**Level kapabilitas APIP**	**level 3**	**level 3**		**level 3**		**level 3**		**level 3**		**Level 4**		**Level 4**		
				Meningkatnya Efektivitas Kapabilitas APIP Daerah	**Persentase Peningkatan Kapabilitas APIP**	**80**	**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu**	100	100	5.797	100	8.522	100	23.294	-		-		-		
					Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	100	100		100		100		-		-		-		
					Persentase pelayanan administrasi Umum sesuai prosedur	100	100		100		100		-		-		-		
					Presentase Penatausahaan Aset yang Sesuai Ketentuan	100	100		100		100		-		-		-		
					Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur	100	100		100		100		-		-		-		
					Presentase Nilai Kepuasan Layanan Internal	100	100		100		100		-		-		-		
					Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar	100	100		100		100		-		-		-		
					Presentase pemenuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	-	-		12		12		-		-		-		
					Presentase terpeliharanya barang milik daerah untuk untuk menunjang kerja perangkat daerah	-	-		100		100		-		-		-		

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai**	**-**	**-**		**-**		**-**		**80**	28.287	**80**	28.287	**80**		
			6.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2 keg**	**2 keg**	**997**	**2 keg**	**1.744**	**2 keg**	**1.091**	**-**		**-**		**-**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**		**-**		**-**		**80**	**632**	**80**	**632**	**80**	**Sekretaris**	
			6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	2	68	2	74	2	14	-		-		-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-		-		-		4	108	4	108	4	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	105	105	521	105	1.044	123	623	-		-		-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-		-		-		200	372	220	372	420	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	215	215	185	215	200	215	234	-		-		-	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
			6.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-		-		-		117	81	117	81	234	Sekretaris, Subag ADUM	Pontianak
					Level Kapabilitas Maturitas SPIP	**level 3**	**level 3**		**level 3**		**level 3**		**level 3**		**level 4**		**level 4**		
				Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan SPIP	**Persentase Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	**80**	**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		
			06.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	0	100	1.144	100	3.524	100	2.842	-		-		-		
					Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	0	100		100		100		-		-		-		
			06.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	-	-		-		-		80	2.764	80	2.764	80		

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.03.1.02	**Pendampingan Dan Asistensi**	**Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	**162**	**162**	**932**	**162**	**3.007**	**162**	**2.387**	**-**		**-**		**-**	**Irban II**	
			6.01.03.1.02	**Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	**-**	**-**		**-**		**-**		**80**	**2.463**	**80**	**2.463**	**80**	**Irban II**	
			6.01.03.1.02.01	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Dan Pendampingan Urusan Pemda	129	129	198	129	397	129	373	-		-		-	Irban II, Sekretaris, Subag ADUM	Pemprov Kalbar
			6.01.03.1.02.01	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-		-		92	355	92	355	184	Irban II, Sekretaris, Subag ADUM	Pemprov Kalbar
					Nilai Persepsi Korupsi	**5,79**	**6,17**		**6,3**		**6,4**		**6,5**		**6,6**		**6,6**		
				Meningkatnya Efektivitas Pembinaaan dan Pengawasan terhadap Integritas Pelayanan Daerah	**Persentase Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi**	-	**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			06.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	-	100	1.144	100	3.524	100	2.842	-		-		-		
					Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	-	100		100		100		-		-		-		
			06.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	-	-		-		-		80	2.764	80	2.764	160		
			6.01.03.1.02	**Pendampingan Dan Asistensi**	**Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	**162**	**162**	**932**	**162**	**3.007**	**162**	**2.387**	**-**		**-**		**-**	**Irban II**	
			6.01.03.1.02	**Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	**-**	**-**		**-**		**-**		**80**	**2.463**	**80**	**2.463**	**80**	**Irban II**	
			6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2	2	62	2	179	2	441	-		-		-	Irban IV	Pemprov Kalbar
			6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	-		-		-		90	331	90	331	180	Irban IV	Pemprov Kalbar

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Persentase Penyelenggaraan Pengawasan terhadap Integritas Pelayanan Daerah	**80**	**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		
			06.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	-	100	1.144	100	3.524	100	2.842	-		-		-		
					Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	-	100		100		100		-		-		-		
			06.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	-	-		-		-		80	2.764	80	2.764	80		
			6.01.03.1.02	**Pendampingan Dan Asistensi**	**Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	**162**	**162**	**932**	**162**	**3.007**	**162**	**2.387**	**-**		**-**		**-**	**Irban II**	
			6.01.03.1.02	**Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan**	**-**	**-**		**-**		**-**		**80**	**2.463**	**80**	**2.463**	**80**	**Irban II**	
			6.01.03.1.02.01	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Dan Pendampingan Urusan Pemda	129	129	198	129	397	129	373	-		-		-	Irban II, Sekretaris, Subag ADUM	Pemprov Kalbar

NO	Tujuan	Sasaran	KODE	Sasaran Program / Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah	Lokasi
							2019	Rp (Jt)	2020	Rp (Jt)	2021	Rp (Jt)	2022	Rp (Jt)	2023	Rp (Jt)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			6.01.03.1.02.01	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-		-		92	355	92	355	184	Irban II, Sekretaris, Subag ADUM	Pemprov Kalbar
			6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	6	6	125	6	1.426	6	494	-		-		-	Irban I, Irban III	Pemprov Kalbar
			6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	-		-		-		5	702	5	702	10	Irban I, Irban III	Pemprov Kalbar
			6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	25	25	547	25	1.004	25	1.078	-		-		-	Irban I, Irban II, Irban V ADUM	Pemprov Kalbar
			6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	-		-		-		141	1.073	141	1.073	28	Irban I, Irban II, Irban V ADUM	Pemprov Kalbar

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1	Indeks Infrastruktur	57.15	66.23	65.15	64.85	68.29	71.24	71.24	
1.2	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB	A	A	
1,3	Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat	B	B	B	BB	BB	A	A	
1,4	Indeks Pembangunan Manusia	66.26	67.20	68.45	69.38	70.29	71.25	71.25	
1,5	Pertumbuhan Ekonomi	5.06	5.09	1,56-3,78	4,51-5,25	4,71-5,46	5,02-5,68	5,02-5,68	
1,6	Gini Rasio	0.33	0.33	0,328-0,327	0,326-0,324	0,323-0,321	0,321-0,318	0,321-0,318	
1,7	Desa Mandiri	1	63	159	239	319	425	425	
1,8	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.26	3.90	5,81 - 4,58	5,70 - 4,49	5,53 - 4,29	5,42 - 3,98	5,42 - 3,98	
1,9	Angka Kemiskinan	7.37	6.92	7,61-7,56	7,40-7,34	7,31-7,23	7,08-7,00	7,08-7,00	
1,10	Konfilk Sosial	0	0	0	0	0	0	0	
1,11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73.09	65.92	67.84	68.06	68.19	68.32	68.32	
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
5	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**								
5.2	Persentase masyarakat mendapat pelayanan ketenteraman dan dan ketertiban umum (%)	100	100	100	100	100	100	100	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
5.3	Indeks Pemahaman terhadap kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	96,95	96,95	97,35	98,35	Program baru PMDN 90/2019
URUSAN PILIHAN									
PENUNJANG URUSAN									

INSPEKTORAT DAERAH									
	Nilai SAKIP Unsur Pengukuran Kinerja	13.72	14:44	15:00	15:50	16:00	16:50	16:50	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
	Nilai SAKIP Unsur Evaluasi Internal	6.32	6,62	7,32	7,62	8,32	8,62	8,62	
	Level Kapabilitas Maturitas SPIP	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	Level 4	Level 4	
	Level Kapabilitas APIP	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	Level 4	Level 4	
	Nilai Persepsi Korupsi	5.79	6.17	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	

Sumber: Bab VIII RPJMD Perubahan Prov. Kalbar 2018-2023

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan urusan pengawasan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja urusan pengawasan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi Kalimantan Barat. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa renstra Inspektorat ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Inspektorat. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Inspektorat serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Barat. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Inspektorat merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan pengawasan dan atau target kinerja sasaran.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Inspektorat yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Inspektorat harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksana tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Inspektorat. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Inspektorat di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Inspektorat ini.

Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami !

INSPEKTUR PROVINSI,

Dra. MARLYNA, M.Si, CRA., CRP, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP 19670115 198603 2 008